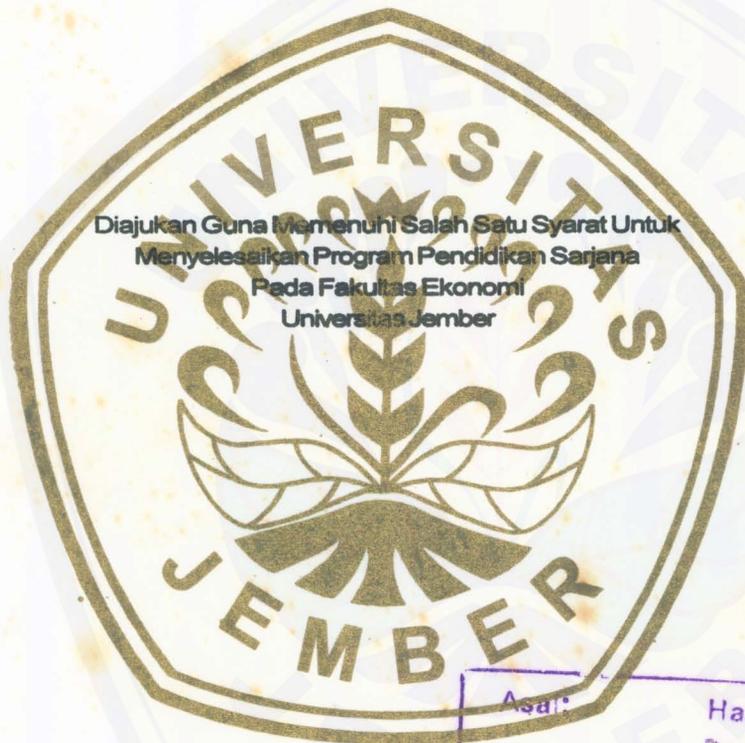


**PERANAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN  
TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH  
DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**



Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Jember

Asal:	Hadiah	Klass
Terima :	17 AUG 2002	328.9
No. Induk :	1409	ROV
KLASIR/PE.YA.LIN :	92	P

9

Oleh :

**Ika Dyah Rosita**

**NIM. : 98-319**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2002**

**JUDUL SKRIPSI**

**PERANAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN  
TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH DI  
KABUPATEN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : IKA DYAH ROSITA

N. I. M. : 980810101319

J u r u s a n : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

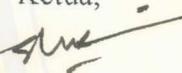
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

20 Juni 2002

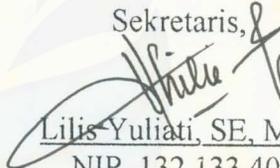
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

**Susunan Panitia Penguji**

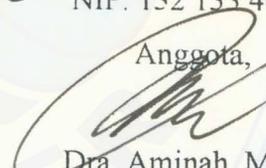
Ketua,

  
Drs. Badjuri, ME  
NIP.131 386 652

Sekretaris,

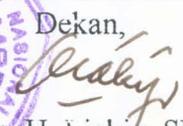
  
Lilis Yuliaty, SE, MSi  
NIP. 132 133 400

Anggota,

  
Dra. Aminah, MM  
NIP. 130 676 291



Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi  
Dekan,

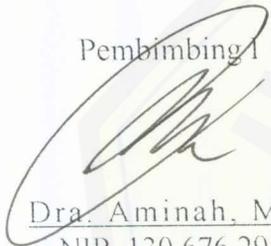
  
Drs. H. Liakip, SU  
NIP. 130 531 976



TANDA PERSETUJUAN

Judul : Peranan Pusat-pusat Pertumbuhan terhadap Pengembangan Wilayah di  
Kabupaten Jember  
Nama : Ika Dyah Rosita  
NIM : 98081010319  
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Konsentrasi : Ekonomi Perencanaan

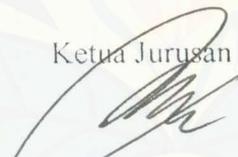
Pembimbing I

  
Dra. Aminah, MM  
NIP. 130 676 291

Pembimbing II

  
Teguh Hadi Priyono, SE, MSi  
NIP. 132 092 300

Ketua Jurusan

  
Dra. Aminah, MM  
NIP. 130 676 291

Tanggal Persetujuan : Juni 2002

**MOTTO**

“Intelektual adalah seseorang yang hidup berkat kebijaksanaan yang tujuan utamanya ialah mendidik diri sendiri”

**(Robert Hutchin)**

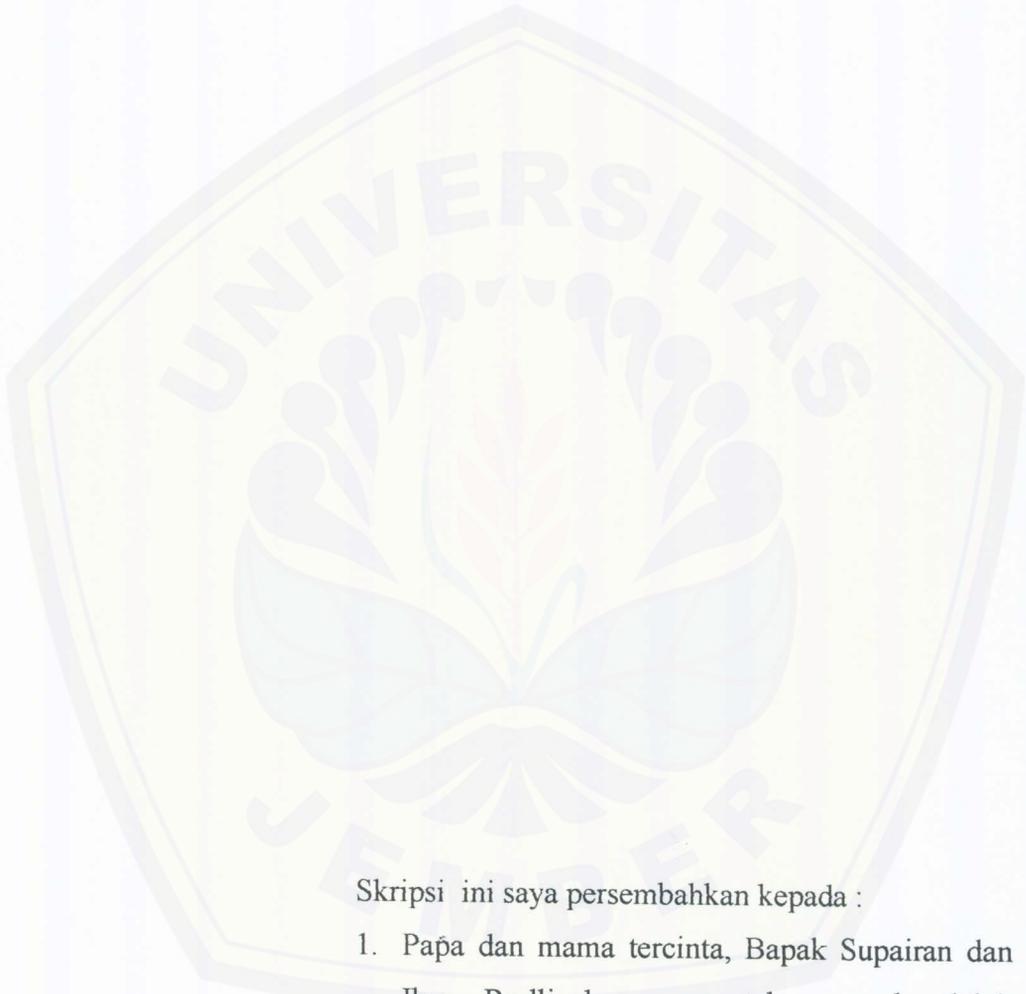
“Bertasbihlah dalam setiap perkataan  
Bertahmidlah dalam setiap sikap dan perbuatan  
Berhamdalahlah dalam setiap kesusahan dan kenikmatan  
Bertahlilah di sela aktivitas, rutinitas dan kesibukan  
Beristifarlah di ketidaksengajaan akan kesombongan”

**(Efran Hafshon)**

“ Dia yang hidup sepenuh-penuhnya adalah dia yang berfikir sebanyak-banyaknya, yang merasakan semulia-mulianya, dan yang berbuat sebaik-baiknya”

**(Ika Dyah Rosita)**

**PERSEMBAHAN**



Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Papa dan mama tercinta, Bapak Supairan dan Ibu Rodliyah yang tak pernah lelah mencurahkan segala perhatian, kasih sayang, do'a dan bimbingannya
2. Almamater yang kubanggakan

## ABTRAKSI

Pembangunan di Indonesia lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mendasarkan pada konsep *trickle down effects* artinya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan terjadi tetesan ke bawah sehingga kebijakan itu lebih mengarah pada pemilihan sektor-sektor yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, maka Kabupaten Jember telah menerapkan pola pembangunan regional yang bertumpu pada kebijaksanaan pusat pertumbuhan, sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pusat pertumbuhan dapat memberikan *spread effects* bagi daerah di belakangnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Indeks gravitasi, analisis indeks aksesibilitas dan analisis indeks Williamson dengan menggunakan indikator jumlah penduduk, jumlah angkatan kerja yang bekerja, jarak antar wilayah dan pendapatan per kapita untuk mengetahui peranan pusat pertumbuhan terhadap pengembangan wilayah belakang Kabupaten Jember.

Dari hasil analisis indeks gravitasi dan indeks aksesibilitas menunjukkan nilai indeks gravitasi rata-rata 40.090.798,81 dan nilai indeks aksesibilitas rata-rata 258,133, hal ini menunjukkan bahwa sarana-sarana yang tersedia di pusat pertumbuhan digunakan oleh daerah belakangnya dan besar pula fungsi pusat pertumbuhan sebagai pusat pelayanan bagi daerah sekitarnya. Hasil analisis indeks Williamson menunjukkan angka rata-rata 0,793 tergolong besar sebab utamanya jauh jarak pusat pertumbuhan dan daerah belakangnya.

Pusat pertumbuhan akan memberikan peranan yang lebih besar dalam pengembangan pembangunan daerah belakangnya meskipun intensitas penyebarannya yang diterima oleh daerah belakang berbeda-beda. *Spread effects* dari pusat pertumbuhan hanya menjangkau daerah sampai batas tertentu, daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan tidak dapat menikmati *spread effects* dari pusat pertumbuhan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peranan Pusat-pusat Pertumbuhan terhadap Pengembangan Wilayah di Kabupaten Jember” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ekonomi.

Dalam proses penulisan skripsi ini, saya mendapat banyak dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik dalam pengumpulan data, petunjuk dalam penulisan dan bantuan lainnya. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

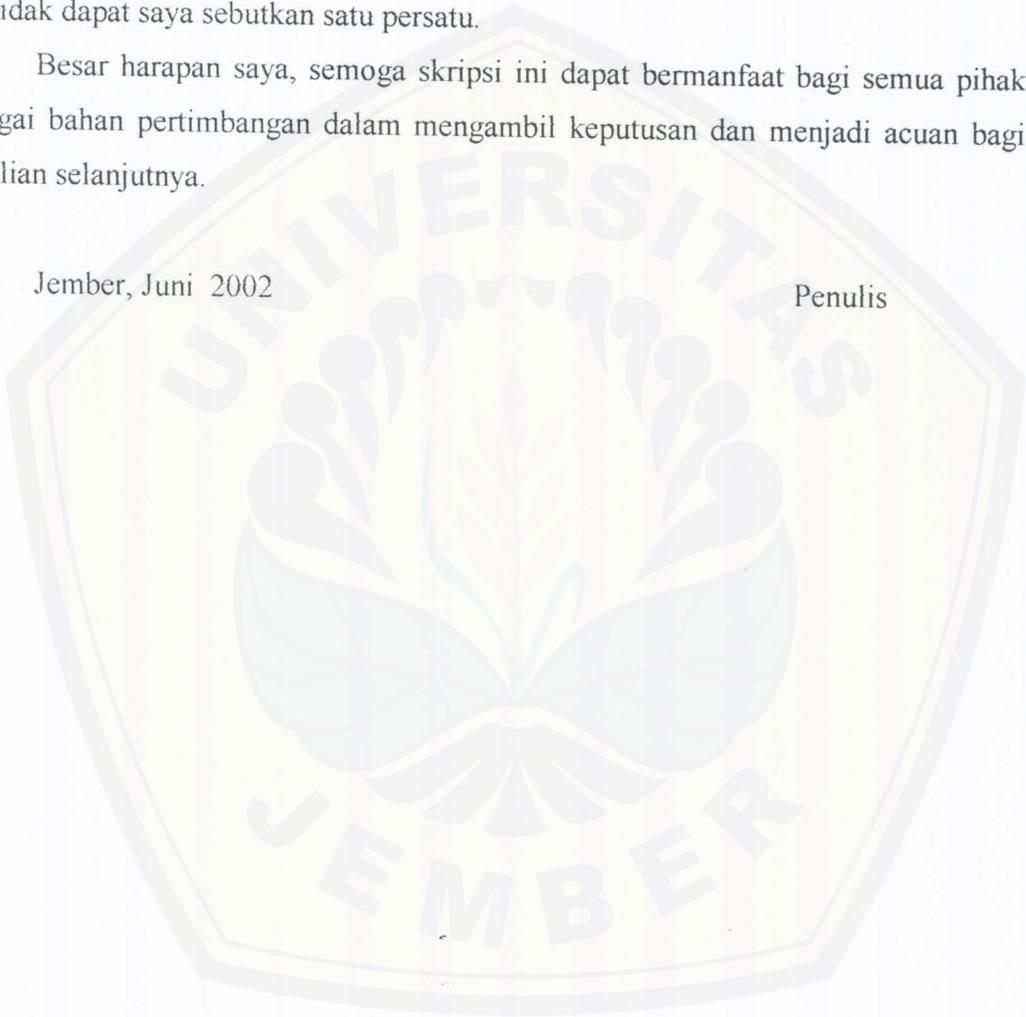
1. Dra. Aminah, MM dan Teguh Hadi Priyono, SE, MSi selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah dengan seksama dan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran-saran yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
2. Drs. H. Liakip, SU, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember beserta Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu, serta staf Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah administrasi selama masa studi;
3. Pimpinan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Bappeda Kabupaten Jember dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember beserta karyawan yang telah memberikan informasi dan data bagi penelitian;
4. Nenek saya, Ibu Salamah yang senantiasa memberikan bimbingan dan do'a kepada saya;
5. Kakak sepupu dan adik saya Adi Kristiono dan Mohammad Sigit Dwi Prasetyo yang telah memberikan semangat dan do'a kepada saya;
6. Ferri Yeni Wahyudi atas segala motivasi dan dukungannya;

7. Sahabat-sahabat saya, Dion, Gugun, Udin, Aji dan teman-teman IESP ganjil angkatan 1998 yang telah menciptakan persahabatan untuk memecahkan segala masalah;
8. Penghuni kost-kostan Jl Jawa VI No.9 dan semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Besar harapan saya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan menjadi acuan bagi penelian selanjutnya.

Jember, Juni 2002

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAKSI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya .....	5
2.2 Landasan Teori .....	6
III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian .....	20
3.2 Prosedur Pengumpulan Data .....	20
3.3 Metode Analisis Data .....	20
3.4 Definisi Variabel Operasional Dan Pengukurannya .....	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum .....	24
4.2 Hasil Analisis.....	35
4.3 Pembahasan .....	41

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan .....	46
5.2	Saran .....	47
DAFTAR	PUSTAKA .....	48
LAMPIRAN	.....	49

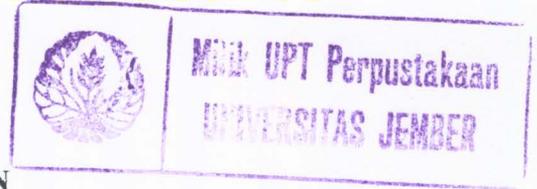


DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Wilayah Administrasi Kabupaten Jember Tahun 2000 .....	25
2.	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2000 .....	26
3.	Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Jember Tahun 2002 .....	27
4.	Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Atas Dasar harga Konstan 1993 di Kabupaten Jember Tahun 2002 .....	29
5.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1996-2000 .....	30
6.	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Kabupaten Jember Tahun 1997-2000 .....	31
7.	Hasil Perhitungan Analisis Indeks Gravitasi dan Indeks Aksesibilitas Pusat Pertumbuhan Terhadap Daerah Belakang Kabupaten Jember Tahun 2000 .....	37
8.	Hasil Pertumbuhan Indeks Williamson Kabupaten Jember Tahun 2000	40

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Jember Tahun 2000 ..	49
2.	Jumlah Tenaga Kerja, Angkatan Kerja Di Kabupaten Jember Tahun 2000 .....	50
3.	Jarak Terdekat Antar Kecamatan Di Kabupaten Jember Tahun 2002 ..	51
4.	Pendapatan Perkapita Menurut Kecamatan Di Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1998-2000.....	52
5.	Perhitungan Analisa Indeks Gravitasi Di Kabupaten Jember Tahun 2000 .....	53
6.	Perhitungan Analisa Indeks Aksesibilitas Di Kabupaten Jember Tahun 2000 .....	54
7.	Perhitungan Analisa Indeks Williamson Di Kabupaten Jember Tahun 2000 .....	55
8.	Peta Perwilayahan Pengembangan Kabupaten Jember .....	56
9.	Peta Satuan Kawasan Pembangunan Kabupaten Jember .....	57



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia diselenggarakan secara bertahap dalam jangka menengah yaitu lima tahunan yang dikenal dalam Repelita. Pada masa pemerintahan Orde Baru pembangunan lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mendasarkan pada konsep *trickle down effects*, artinya bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan terjadi tetesan ke bawah sehingga kebijaksanaan itu lebih mengarah pada pemilihan sektor-sektor yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut biasanya disebut dengan kebijaksanaan sektoral. (Glasson, 1991)

Pembangunan sektoral yang diterapkan pada setiap Repelita memperlihatkan perkembangan pada setiap daerah yang ada di Indonesia sangat bervariasi. Hal ini mendorong terjadinya ketimpangan di berbagai wilayah. Berdasarkan konsep ini, perkembangan hanya akan terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki keunggulan komparatif. Sementara daerah lain yang tidak memiliki keunggulan komparatif tidak mungkin dapat meningkatkan pembangunan. Ketimpangan di berbagai wilayah bukanlah suatu harapan dari pelaksanaan pembangunan selama ini akibat pembangunan yang selalu berorientasi pada pertumbuhan, ternyata bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak memberi pemecahan yang memuaskan mengenai kemiskinan. Tetesan ke bawah yang diharapkan tidak kunjung tiba, justru memperbesar adanya kesenjangan ekonomi. Mengingat bahwa tujuan bernegara terutama adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, maka sudah seharusnya apabila Pemerintah Indonesia kemudian melakukan reorientasi kebijaksanaan, namun hal tersebut tidak berarti meninggalkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian hanya semata-mata berorientasi pada keadilan atau pemerataan ekonomi sebagai tujuan perencanaan. Reorientasi tersebut lebih diartikan

sebagai perubahan pola pertumbuhan dan distribusi yang ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan tanpa mengabaikan aspek keadilan. (Glasson, 1991)

Pemilihan antara pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan orientasi keadilan menjadi suatu permasalahan tersendiri dalam pola kebijaksanaan pembangunan. Pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi akan mengabaikan aspek keadilan, sebaliknya pembangunan yang terlalu berorientasi pada keadilan akan mengabaikan pertumbuhan ekonomi. Untuk menjembatani masalah tersebut, maka konsep pembangunan wilayah yang bertumpu pada teori pusat pertumbuhan menjadi salah satu alternatif pemecahannya. Konsep pembangunan wilayah di samping pola pembangunan yang memperhatikan sektoral juga terkait pola pembangunan yang memperhatikan kemampuan dari setiap daerah yang tumbuh dengan kemampuan mereka masing-masing yang bertitik tolak pada keunggulan komparatif wilayah.

Keadaan geografis Indonesia yang menggambarkan adanya keanekaragaman baik sumberdaya alam, budaya, iklim, potensi ekonomi, sumberdaya manusia yang terdapat di masing-masing daerah, menjadi sangat sesuai dengan penerapan konsep pembangunan wilayah yang bertumpu pada teori pusat pertumbuhan dengan tidak mengadakan yang satu dan meniadakan yang lain antara pertumbuhan dan keadilan ekonomi. Strategi pertumbuhan dengan keadilan merupakan ciri khusus dari teori pusat pertumbuhan dan jika kita tarik ke belakang maka sesuai dengan amanat UUD 1945.

Kabupaten Jember mempunyai luas 3.293,34 km<sup>2</sup> atau 329.333,94 Ha dengan jumlah penduduk menurut hasil Suseñas pada akhir tahun 2000 tercatat sebesar 2.162.668 jiwa. Secara administratif Kabupaten Jember terbagi menjadi delapan Pembantu Bupati/Distrik, tiga puluh satu kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 244 desa/ kelurahan. Masing-masing daerah itu mempunyai corak dan struktur geografi yang berbeda-beda, seperti yang terdapat di daerah pegunungan dan daerah pantai, yang kesemuanya itu membentuk struktur ekonomi masing-masing mempunyai tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda, baik itu tergolong maju atau

lamban. Diharapkan dalam waktu jangka panjang peran serta daerah-daerah dapat mendukung sektor-sektor ekonomi menuju ke arah yang tingkat pertumbuhannya maju dan merata. Secara riil pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember dilihat dari perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan tahun 1998 perhitungan ekonomi mengalami kontraksi ekonomi yang cukup tajam yaitu sebesar -7,58 %, adalah sangat wajar apabila pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun setelah itu menjadi cukup penting. Jika tahun 1999 pemulihan ekonomi di Jember sebesar 1,89 % maka pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember sudah menunjukkan tanda-tanda pulih kembali, yaitu sebesar 3,33 % dengan tingkat inflasi sebesar 9,00 %. Tahun 2000 PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993 Kabupaten Jember adalah sebesar 2.208.057,36 (juta rupiah) pendapatan perkapita Kabupaten Jember tahun 2000 adalah sebesar Rp. 2.249.110,00 meningkat 12,23 % bila dibandingkan pada tahun sebelumnya (BPS Kabupaten Jember, 2000 : xvii).

## 1.2 Perumusan Masalah

Kabupaten Jember telah menerapkan pola pembangunan regional yang bertumpu pada kebijaksanaan pusat pertumbuhan, sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan kebijaksanaan pusat pertumbuhan mengandung harapan agar tercipta pertumbuhan ekonomi dengan cepat, namun tetap disertai dengan pemerataan distribusi pendapatan. Dalam perjalanannya kebijaksanaan pusat pertumbuhan ini belum mampu sepenuhnya mewujudkan harapan tersebut. Pertumbuhan yang tidak merata di masing-masing daerah, adanya kesenjangan pendapatan antara daerah, penyebaran penduduk yang tidak merata, merupakan masalah yang belum teratasi. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang timbul dalam pengembangan wilayah Kabupaten Jember yaitu apakah pusat pertumbuhan dapat memberikan *spread effects* terhadap daerah belakangnya, dan seberapa besar kesenjangan pendapatan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

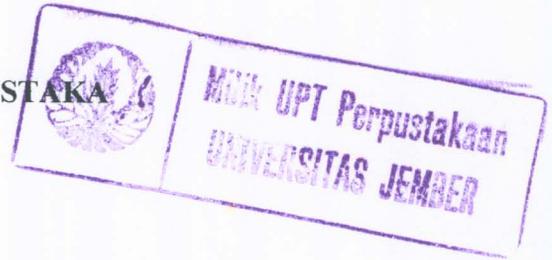
1. peranan pusat pertumbuhan terhadap pengembangan daerah belakang Kabupaten Jember;
2. tingkat kesenjangan pendapatan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang Kabupaten Jember.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai :

1. bahan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Jember guna dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi penggarisan keputusan-keputusan atau kebijaksanaan pembangunan ekonomi selanjutnya;
2. bahan informasi dan pembanding bagi pembaca dan peneliti lain yang berminat meneliti masalah yang berkaitan dengan penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA



### 2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian Sugiarto (1997) dengan judul Peranan Pusat-pusat Pertumbuhan terhadap Pengembangan Wilayah di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, menunjukkan keberadaan pusat sub satuan pembangunan dalam kebijaksanaan perwilayahan di Kabupaten Banyuwangi mampu memberikan peranan terhadap pengembangan wilayah daerah belakangnya. Hal ini ditunjukkan dengan angka indeks gravitasi dengan rata-rata 247853517,5 dengan nilai tertinggi 1669629842 dan nilai terendah 7287186,9. Angka indeks aksesibilitas menunjukkan rata-rata 5,9 dengan nilai tertinggi 15 dan nilai terendah 0,87. Semakin besar nilai indeks gravitasi dan nilai indeks aksesibilitas menunjukkan bahwa sarana-sarana yang tersedia di pusat pertumbuhan digunakan sepenuhnya oleh daerah-daerah belakangnya dan semakin besar pula fungsi pertumbuhan sebagai pusat pelayanan bagi daerah sekitarnya. Bukti adanya peranan pusat sub satuan wilayah pembangunan juga ditunjukkan oleh kecilnya angka indeks Williamson yang rata-ratanya sebesar 0,117 dengan nilai tertinggi 0,401 dan nilai terendah 0,046. Dinyatakan terjadi kesenjangan apabila nilainya mendekati angka satu, sehingga secara umum menggambarkan bahwa kesenjangan pendapatan pada masing-masing sub satuan wilayah pembangunan di Kabupaten Banyuwangi kecil.

Pratiwi (1998) yang berjudul Peranan Pusat-pusat Pertumbuhan terhadap Pengembangan Wilayah di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang menggunakan analisis indeks gravitasi dan indeks aksesibilitas untuk mengetahui peranan pusat sub satuan pembangunan Kabupaten Malang terhadap pengembangan daerah belakangnya. Angka indeks gravitasi ditunjukkan dengan nilai tertinggi sebesar 150564282,4 dan nilai terendah sebesar 359589,1644. Nilai indeks gravitasi dinyatakan tinggi apabila nilainya di atas enam angka. Angka indeks aksesibilitas tertinggi sebesar 868,672 dan terendah sebesar 1,522. Nilai indeks aksesibilitas

dinyatakan tinggi apabila nilainya melebihi angka satu. Makin besar nilai indeks gravitasi dan nilai indeks aksesibilitas, menunjukkan bahwa sarana-sarana yang tersedia di pusat pertumbuhan digunakan sepenuhnya oleh daerah-daerah belakangnya. Dengan menggunakan analisis indeks Williamson dapat diketahui terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan di Kabupaten Malang walaupun kecil. Nilai indeks Williamson tertinggi di daerah pengembangan Malang Utara dengan pusat pertumbuhan di Kecamatan Batu, Ngantang dan Lawang sebesar 0,4488. Dengan demikian terjadi kesenjangan pendapatan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Pusat Pertumbuhan**

Teori tempat sentral telah melandasi dikembangkannya teori pusat pertumbuhan. Teori ini menekankan pada dinamisme dan aglomerasi industri-industri yang memungkinkan kebijaksanaan secara simultan, yaitu yang utama adalah pemilihan pusat-pusat yang dominan disamping mendesentralisasikan kegiatan-kegiatan ekonomi. Teori ini menyarankan keperluan untuk memusatkan investasi dalam sejumlah sektor kunci pada beberapa tempat tertentu. Dalam memusatkan usaha dalam sejumlah sektor dan tempat kecil diharapkan pembangunan akan menjangar pada sektor-sektor lain pada seluruh wilayah. Dengan demikian sumber-sumber material dan manusiawi yang digunakan dapat dimanfaatkan lebih baik dan efisien (Glasson, 1991:157).

Pusat pertumbuhan tidaklah hanya merupakan lokasi dari industri-industri inti. Pusat pertumbuhan juga harus mendorong ekspansi yang besar di daerah sekitarnya. Pada dasarnya teori pusat pertumbuhan menerangkan akibat dari sekelompok kesatuan-kesatuan yang memimpin atau karena polarisasi. Prasarana yang sudah sangat berkembang, penyediaan pelayanan-pelayanan sentral, permintaan-permintaan terhadap faktor produksi dari daerah pengaruh dan persebaran

kesadaran pertumbuhan dan dinamisme ke seluruh daerah pengaruh kesemuanya ini adalah penting untuk mendorong polarisasi (Richardson, 1991:85).

Dalam memilih titik-titik pertumbuhan baru, penentu-penentu lainnya juga harus diperhitungkan. Kemudian memperoleh sumber-sumber langka yang persediannya melimpah, keuntungan-keuntungan yang berkenaan dengan pusat transpor. Kedekatan pada pemanfaatan lokasional penting yang tidak dapat diangkut (misalnya pelabuhan udara) adalah segelintir dari faktor-faktor yang sangat jelas mempengaruhi pemilihan tempat bagi investasi prasarana.

Teori pusat pertumbuhan dijabarkan secara induktif dari pengamatan atas perkembangan ekonomi. Dengan pengembangan suatu tipologi ruang ekonomi, yang terpenting antara lain adalah tipologi ruang ekonomi sebagai suatu ajang kekuatan-kekuatan dari tipologi mana penjabaran konsep suatu pusat sebagai vektor dari kekuatan-kekuatan ekonomi. Sebagai suatu ajang kekuatan-kekuatan ruang ekonomi terdiri dari pusat-pusat dari mana memancar kekuatan-kekuatan sentrifugal dan ke mana kekuatan-kekuatan sentripetal ditarik (Glasson, 1991:172).

Pendapat beberapa pakar dalam teori pusat pertumbuhan ini antara lain adalah :

1. Perraoux berpendapat bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama, kemunculannya hanya akan terjadi di berbagai tempat atau pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda serta berkembang melalui saluran yang berbeda dengan akibat akhir yang ditimbulkan berbeda pula terhadap keseluruhan perekonomian (Nuryasman, 1996:241);
2. Myrdall menekankan analisisnya pada faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya ketidakseimbangan di berbagai daerah, yaitu *backwash effect* dan *spread effects*. Suatu daerah yang lebih maju akan berkembang lebih cepat daripada yang kurang maju karena faktor-faktor yang menimbulkan *spread effect* ke daerah yang lebih miskin dan menyebabkan ketidakseimbangan yang makin lama semakin bertambah di berbagai daerah (Nuryasman, 1996:243);

3. Hirschman sependapat dengan Perraoux dan Myrdall. Hirschman berpendapat bahwa kemajuan ekonomi tidak terjadi pada waktu yang sama di berbagai daerah dan apabila di suatu daerah terjadi pembangunan, terdapat daya tarik yang kuat yang akan menciptakan konsentrasi pembangunan ekonomi di sekitar daerah dimana pembangunan bermula (Nuryasman, 1996:243);
4. Boudeville menampilkan konsep pusat pertumbuhan yang berlokasi dan mengikuti pendapat dari Perraoux. Boudeville mendefinisikan konsep pusat pertumbuhan wilayah sebagai seperangkat industri-industri sedang berkembang lebih lanjut dari kegiatan ekonomi melalui daerah pengembangannya (Sukirno, 1979:67).

Teori pusat pertumbuhan mempunyai keistimewaan yakni dapat menggabungkan prinsip desentralisasi secara bersamaan. Asas desentralisasi yang dimaksud adalah suatu asas wewenang dan diberikan kepada pemerintah daerah untuk menentukan dan mengelola sebagian dari kegiatan pemerintah dan pembangunan. Sumber pembiayaan berasal dari pendapatan asli daerah serta subsidi pembangunan dari pemerintah pusat yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkisar 10 %. Asas dekonsentrasi yakni wewenang pemerintah pusat untuk menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara keseluruhan. Sumber pembiayaan berasal dan diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berkisar 10 % (Nuryasman, 1996:245). Disamping keistimewaan tersebut ada beberapa sebab mengapa teori pusat pertumbuhan sangat menarik sebagai suatu kebijaksanaan (Glasson, 1991:183) :

1. adanya berbagai macam keuntungan aglomerasi, teori ini cenderung untuk menjadi suatu cara yang sangat efisien untuk menimbulkan perkembangan;
2. dari segi anggaran belanja negara, pemusatan investasi pada titik-titik pertumbuhan tertentu adalah lebih murah daripada pemberian bantuan besar-besaran kepada daerah-daerah yang miskin;

3. *spread effects* yang ditimbulkan oleh titik pertumbuhan akan membantu memecahkan persoalan-persoalan yang dialami oleh daerah-daerah yang sedang merosot.

Konsep dasar teori pusat pertumbuhan dan kutub pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai berikut (Glasson, 1991:172)

1. konsep *leading industries* dan perusahaan-perusahaan propulsif, menyatakan pada pusat pertumbuhan terdapat perusahaan yang propulsif dan besar yang termasuk dalam *leading industries* yang mendominasi unit ekonomi lainnya;
2. konsep polarisasi menyatakan bahwa pertumbuhan yang cepat dari *leading industries* mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya ke kutub pertumbuhan;
3. konsep *spread effects* menyatakan bahwa pada waktu kualitas propulsif dinamik pada kutub pertumbuhan akan memancar keluar dan memasuki ruang sekitarnya. *Spread effects* dikenal juga dengan *trickle down effects* sangat menarik bagi perencanaan regional dan telah memberi sumbangan besar bagi teori pusat pertumbuhan sebagai sarana kebijaksanaan

## 2.2.2 Konsep Ruang dan Wilayah

### a. Konsep Ruang

Ruang merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan wilayah. Konsep ruang mempunyai beberapa unsur yaitu : jarak, lokasi, bentuk, dan ukuran. Konsep ruang juga berkaitan erat dengan waktu, dikarenakan bahwa pemanfaatan bumi dan segala kekayaannya membutuhkan organisasi/pengaturan ruang dan waktu. Unsur-unsur tersebut di atas secara bersama-sama menyusun unit tata ruang yang disebut wilayah. Hartchorne mengintroduksikan unsur hubungan fungsional di antara fenomena, yang melahirkan konsep struktur fungsional tata ruang. Struktur fungsional tata ruang bersifat subyektif, karena setiap peneliti dapat menentukan fungsionalitas berdasarkan kriteria subyektif (Budiharsono, 1989 : 30).

Whittlessey (1954) memformulasikan pengertian baru mengenai ruang berdasarkan (1) unit areal konkrit, (2) fungsionalitas antara lain fenomena, dan (3) subyektifitas dalam penentuan kriteria. Hal yang patut mendapat perhatian terhadap konsep ini adalah adanya kontradiksi dalam cara pemikirannya. Di satu pihak terdapat obyektifitas yaitu tempat suatu lokasi yang unik dari suatu unit area, sedangkan di lain pihak terdapat subyektifitas yaitu gambaran suatu unit tata ruang yang berbeda dan hanya berada dalam benak para peneliti (Budiharsono, 1989 : 30).

Tipologi dari suatu wilayah dapat digambarkan sebagai berikut (Budiharsono, 1989 : 31) :

- 1) gambaran tunggal dari suatu wilayah, yaitu persamaan suatu wilayah ditentukan oleh satu fenomena, misalnya jenis tanah, agama, dan sebagainya. Wilayah ini merupakan unit terkecil dan dapat ditentukan batas-batas unit area;
- 2) gambaran mejemuk dari suatu wilayah, yaitu suatu wilayah dengan fenomena yang kompleks dengan beberapa persamaan di dalamnya. Gambaran majemuk dapat terdiri atas beberapa gambaran tunggal dari suatu wilayah, tetapi bila terdapat fenomena yang kompleks yang diperlukan oleh peneliti maka wilayah ini dapat merupakan suatu wilayah yang kompak.

#### **b. Konsep Wilayah**

Wilayah merupakan suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara interval. Wilayah dapat dibagi menjadi empat jenis yaitu (Budiharsono, 1989 : 32) :

- 1) Wilayah Homogen;

Wilayah homogen adalah wilayah yang dipandang dari suatu aspek mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri yang relatif sama. Sifat-sifat dan ciri-ciri homogen misalnya dalam hal ekonomi (seperti daerah dengan struktur produksi atau pola konsumen yang homogen, pendapatan perkapita), geografi (seperti wilayah yang mempunyai topografi atau iklim yang sama), agama, suku, dan sebagainya. Richardson (1991) dan Hoover (1977) mengemukakan bahwa

wilayah homogen dibatasi berdasarkan keseragamannya secara internal (*internal uniformity*). Contoh wilayah homogen adalah Jalur Pantura (Jatiluhur Pantai Utara, Jawa Barat).

2) Wilayah Nodal (*Nodal Region*);

Wilayah nodal adalah wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat dan daerah belakangnya (*hinterland*). Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor produksi, barang dan jasa, ataupun komunikasi dan transportasi. Sukirno (1991) menyatakan bahwa pengertian wilayah nodal yang paling ideal untuk digunakan dalam analisis mengenai ekonomi ruang, mengartikan wilayah itu sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi.

Hoover (1977) mengatakan bahwa struktur dan wilayah nodal dapat digambarkan sebagai satu sel hidup atau suatu atom, dimana terdapat satu inti dan suatu daerah periferi yang saling melengkapi. Contoh wilayah nodal adalah wilayah Jakarta dengan wilayah Botabeknya (Bogor, Tangerang dan Bekasi). Jakarta merupakan intinya, sedangkan Botabek sebagai daerah belakangnya.

3) Wilayah Administratif;

Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik seperti : Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, Rukun Kampung (RK), dan Rukun Tetangga (RT). Sukirno mengatakan bahwa di dalam praktek apabila membahas mengenai perancangan pembangunan wilayah, maka pengertian wilayah administrasi merupakan pengertian yang paling banyak digunakan, dikarenakan : (a) dalam melaksanakan kebijaksanaan dan rencana pembangunan wilayah diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai badan pemerintah; (b) wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan atas satuan administrasi pemerintahan lebih mudah dianalisis.

#### 4) Wilayah Perencanaan.

Boudeville (dalam Glasson, 1991) mendefinisikan wilayah perencanaan (*planning region* atau *programming region*) sebagai wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Wilayah perencanaan dapat dipandang sebagai suatu wilayah yang cukup besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan penting dalam penyebaran penduduk dan kesempatan kerja, namun cukup kecil untuk memungkinkan persoalan-persoalan perencanaannya dapat dipandang sebagai satu kesatuan.

Klaessen (dalam Glasson, 1991) percaya bahwa wilayah perencanaan antara lain : (a) harus cukup besar untuk mengambil keputusan-keputusan investasi yang berskala ekonomi; (b) harus mampu menyulap industrinya sendiri dengan tenaga kerja yang diperlukan; (c) harus mempunyai struktur ekonomi yang homogen; (d) harus mempunyai sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan (*growth point*); (e) harus menggunakan suatu cara pendekatan perencanaan pembangunan; (f) masyarakat dalam wilayah perencanaan mempunyai kesadaran bersama terhadap persoalan-persoalannya. Contoh wilayah perencanaan adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy, DAS Kali Konto, DAS Brantas, DAS Cimanuk, dan sebagainya. DAS dari hulu sampai hilir dilakukan perencanaan secara terpadu, karena perlakuan di hulu akan berakibat di bagian hilir.

Gunnar Myrdall mengemukakan bahwa tempat-tempat yang menarik adalah tempat-tempat yang memiliki dan membina kondisi-kondisi alamiah yang sangat baik bagi pemusatan kegiatan perekonomian, sehingga daerah ini memiliki keuntungan komparatif (*comparative advantage*) dibandingkan daerah lainnya (Nuryasman, 1996:243).

Pembangunan wilayah membutuhkan konsep pembangunan wilayah (*spatial development*) dengan memperhatikan kemampuan dari setiap daerah yang tumbuh dengan kemampuan masing-masing dengan bertitik tolak kepada keunggulan komparatif. Dengan adanya keunggulan komparatif yang dimiliki oleh suatu daerah itu memberikan *forward linkage* dan *backward linkage* bagi daerah lainnya. (Glasson, 1991:174)

Perkembangan ekonomi tidak lepas dari peranan sektor-sektor dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, setiap sektor memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan masing-masing sektor dalam merebut pasar. Semakin baik suatu sektor berarti sektor itu memiliki keunggulan komparatif sehingga sektor tersebut mempunyai potensi untuk dikembangkan dan dijadikan *leading sector*. (Glasson, 1991:174)

Dengan demikian jelas bahwa pada prinsipnya pertumbuhan hanya akan terjadi pada daerah yang mempunyai keuntungan komparatif baik dari segi sumber daya alam, modal, dan manusia. Akibat adanya perbedaan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah mengakibatkan tingkat pertumbuhan juga akan berbeda.

### 2.2.3 Konsep Dasar Pengembangan Wilayah

Konsep pengembangan wilayah nasional Indonesia mempunyai tujuan-tujuan yaitu (Hadjisaroso, 1982:2) : (1) mewujudkan keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya; (2) memperoleh kesatuan ekonomi nasional; (3) memelihara efisiensi pertumbuhan nasional. Ketiga tujuan tersebut saling berkaitan dan berkelakuan searah, satu di antara ketiganya merupakan titik sentral, yaitu keseimbangan antara daerah dalam tingkat pertumbuhannya.

Keseimbangan antar daerah selain memenuhi tuntutan keadilan sosial juga memungkinkan berlangsungnya perdagangan antara daerah yang berimbang. Perdagangan antar daerah yang berimbang adalah perdagangan yang efisien. Perdagangan yang efisien mendorong semakin intensifnya perdagangan antar daerah. Perdagangan antara daerah yang intensif merangsang timbulnya spesialisasi daerah yang berarti pula membuka kesempatan yang lebih besar bagi masing-masing daerah untuk berkembang. Perdagangan yang berpijak pada spesialisasi daerah merupakan dasar bagi pertumbuhan nasional yang efisien, dengan demikian usaha untuk

memelihara pertumbuhan yang efisien jelas sejalan dengan terwujudnya keseimbangan antara daerah.

Konsep pengembangan wilayah memerlukan keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya. Tingkat pertumbuhan yang tinggi serta merata mendorong suatu daerah untuk memperkokoh kesatuan ekonomi nasional. Keseimbangan antar daerah akan memperkokoh ekonomi nasional, secara tidak langsung akan terpelihara pertumbuhan nasional yang efisien (Hadjisaroso, 1982 : 1 - 2).

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, dalam konsep pengembangan wilayah dapat ditingkatkan dengan pemilihan lokasi yang di nilai paling menguntungkan antara yang menghasilkan barang atau jasa, hal ini tidak mengurangi kecenderungan untuk tetap berkelompok, mengingat bahwa (a) berkelompoknya kegiatan usaha tetap merupakan langkah yang menguntungkan, dan (b) kegiatan usaha penghasil jasa mudah menyesuaikan diri, sehubungan dengan ciri-ciri pelayanannya, yaitu yang berjangkauan lokal maupun berorientasi ke dalam saja (Hadjisaroso, 1990:4).

Konsep Pengembangan Wilayah Regional mendefinisikan suatu wilayah, yaitu sebutan untuk lingkungan permukaan bumi pada umumnya dan tentu batasnya. Untuk lebih menyederhanakan pengertian wilayah, dibagi wilayah nasional dan wilayah daerah regional. Wilayah nasional adalah sebutan untuk wilayah dalam batas kekuasaan negara. Daerah regional adalah sebutan untuk wilayah dalam batas kewenangan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh adalah batas propinsi, kabupaten, kotamadya, kecamatan dan desa. Wilayah Nasional terbagi dalam daerah-daerah, dalam pelaksanaannya menerapkan kebijaksanaan nasional melalui proses pengaturan pemerintah daerah regional (Hadjisaroso, 1982:8).

Realisasi dari kebijaksanaan pembangunan tersebut dibentuklah wilayah-wilayah pembangunan yang dikelompokkan berdasarkan perbatasan daerah, dengan memperhatikan pengaruh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi akan digantikan pengaruh dari pusat lainnya. Satuan Wilayah Pembangunan merupakan berbagai jenis kegiatan yang tercakup dalam sektor pemerintah maupun masyarakat dan

pelaksanaannya diatur dalam rangka usaha-usaha memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup masyarakat melalui proyek pengembangan antar sektor, pada satu atau lebih Wilayah Pembangunan yang menghubungkan beberapa daerah untuk membentuk kegiatan hubungan tiap sektor ekonomi. Dengan adanya SSWP diharapkan tingkat pertumbuhan antar wilayah pembangunan dapat ditingkatkan (Sukirno, 1979:2).

Berbagai jenis kegiatan baik yang tercakup dalam sektor pemerintah maupun masyarakat dilaksanakan dan diatur dalam rangka usaha-usaha memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Usaha-usaha sedemikian itu pada dasarnya bersifat meningkatkan pemanfaatan sumber daya serta meningkatkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan. Melalui produk-produknya berbagai jenis kegiatan tersebut membawa pengaruh pada peningkatan kawasan, baik dalam arti kualitas dan jenis maupun luas serta jumlahnya.

Peningkatan pada kawasan dapat pula diartikan sebagai peristiwa pengembangan pada wilayah bersangkutan, maka keseluruhan usaha yang mengarah pada perbaikan dalam tingkat kesejahteraan hidup masyarakat dapat dipandang sebagai penyebab berlangsungnya proses perkembangan wilayah. Proses berkembangnya wilayah berlangsung dengan mengikuti mekanisme tertentu yang disebut dengan satuan mekanisme pengembangan (Hadjisaroso, 1982:8).

Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) adalah tinjauan obyek “seperti adanya” atas produk dari proses berkembangnya wilayah yang berlaku untuk tiap satu satuan mekanisme pengembangan. Pada wilayah nasional dapat dijumpai satu atau lebih, namun berbeda dengan pengertian daerah, wilayah nasional tidak selalu terbagi dalam SWP-SWP tergantung pada tingkat pengembangan SWP-SWP bersangkutan. Satu SWP dapat mencakup bagian dari suatu daerah atau mencakup bagian-bagian dari beberapa daerah ataupun keseluruhan bagian dari sejumlah daerah (Hadjisaroso, 1982:18).

Pengaruh besar adanya kebijaksanaan SSWP ini akan tercapai kesempatan untuk tumbuh kegiatan-kegiatan usaha lebih tinggi, sehingga pertumbuhan suatu daerah akan lebih tinggi. Kebijaksanaan SSWP bertujuan untuk mencapai

kemudahan-kemudahan pengembangan suatu daerah serta mewujudkan keseimbangan antar daerah untuk lebih efektif dan efisien (Sukirno, 1979:2).

Pengembangan SSWP terjadi oleh pertumbuhan modal yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Pengembangan kedua jenis sumber daya berlangsung sedemikian rupa, sehingga menimbulkan arus barang. Timbulnya arus barang merupakan sumber kekuatan pengembangan untuk pertumbuhan modal. Makin luas jangkauan arus barang, akan makin besar pula kesempatan terbuka untuk pertumbuhan modal. Luas jangkauan arus barang ditentukan oleh tinggi nilai ataupun nilai tambah pada barang. SSWP memungkinkan arus barang antara daerah lebih berkembang, karena menghubungkan antar daerah (Hadjisaroso, 1982:12).

#### 2.2.4 Konsep Teori Indeks Gravitasi

Model gravitasi dalam perencanaan sosial ekonomi dikembangkan berdasarkan konsep hukum gravitasi Newton dalam ilmu fisika. Menurut hukum gravitasi Newton gaya tarik antara dua benda bergantung pada perkalian massa kedua benda tersebut dan berbanding terbalik antara jarak di antara pusat massa kedua benda tersebut (Gaspers, 1990:109).

Dalam analisis gravitasi, daerah dianggap sebagai suatu massa. Hubungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dipersamakan dengan hubungan antara massa-massa wilayah yang mempunyai daya tarik sehingga saling mempengaruhi antara daerah sebagai perwujudan kekuatan tarik-menarik (interaksi) antar daerah (Soewarjoko, 1984:43).

Indeks gravitasi ini dihitung sebagai berikut (Bintarto, 1982:80) :

$$I_{12} = a \frac{P_1 P_2}{(J_{12})^b}$$

Dimana :

$I_{12}$  : interaksi antara wilayah 1 dan 2

- $P_1$  : jumlah penduduk wilayah 1 (orang)  
 $P_2$  : jumlah penduduk wilayah 2 (orang)  
 $J_{12}$  : jarak antara wilayah 1 dan 2  
a : konstanta empirik yang besarnya 1  
b : eksponen jarak yang besarnya 2

Indeks gravitasi dinyatakan besar apabila nilainya melebihi enam angka. Menunjukkan semakin besar indeks gravitasi semakin besar pula fungsi pusat pertumbuhan pusat pelayanan daerah sekitarnya sehingga semakin besar pula pengaruh pusat pertumbuhan bagi pengembangan daerah belakang.

Dengan menggunakan model gravitasi, maka akan dapat diukur interaksi antara dua daerah. Dalam hal ini Edward Ullman telah mensistematisasikan pengertian interaksi keruangan yang didasarkan pada tiga faktor yaitu, daerah yang saling melengkapi (*region complementarity*), kesempatan berinteraksi dan kemudahan transfer. Komplementaritas daerah adalah adanya daerah yang berbeda kemampuan sumber dayanya, di satu pihak surplus dan di lain pihak minus. Kondisi ini memberikan kemungkinan terjadinya pengaliran yang besar dan menimbulkan interaksi keuangan yang tinggi intensitasnya. Kesempatan berinteraksi adalah kemungkinan perantara yang menghambat interaksi. Kemudahan transfer adalah fungsi jarak yang diukur dalam biaya dan waktu nyata, juga termasuk karakteristik yang khusus dari daerah yang ditransfer. Komoditi tertentu yang dibutuhkan suatu daerah dari daerah yang lain yang tertentu pula memiliki daya transfer yang tinggi (Sumaatmadja, 1981:52).

### 2.2.5 Konsep Teori Indeks Aksesibilitas

Model ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa aksesibilitas angkutan yang bekerja merupakan faktor utama yang menentukan pertumbuhan populasi lokasi. Model ini sesungguhnya bukan merupakan model gravitasi murni, karena tidak didasarkan pada interaksi (daya tarik menarik) di antara daerah. Untuk itu lebih tepat dinamakan model potensial, karena mempertimbangkan interaksi potensial atau

aksesibilitas relatif dari wilayah. Hansen menyatakan bahwa hubungan diantara populasi lokasi dapat dinyatakan dalam bentuk indeks aksesibilitas yang mendefinisikan untuk setiap wilayah mempunyai aksesibilitas angkutan yang bekerja. Indeks aksesibilitas ini dihitung sebagai berikut (Gaspers, 1990:121) :

$$A_{ij} = \frac{E_j}{(d_{ij})^b}$$

Dimana :

- $A_{ij}$  : indeks aksesibilitas dari daerah i dalam hubungannya daerah j
- $E_j$  : total angkatan kerja yang bekerja dalam daerah j (orang)
- $d_{ij}$  : jarak antara daerah i dan j (km)
- $b$  : eksponen jarak yang besarnya 2

Indeks aksesibilitas dinyatakan besar apabila nilainya lebih dari satu, maka semakin besar nilai indeks aksesibilitas berarti semakin besar pula fungsi pusat pertumbuhan sebagai pusat pelayanan daerah sekitarnya sehingga semakin besar pula pengaruh pusat pertumbuhan bagi pengembangan daerah belakang.

Hansen juga menyatakan bahwa dalam aksesibilitas, satu faktor penting yang menentukan berapa banyak populasi akan tertarik ke daerah (area) tertentu adalah jumlah lahan kosong yang dapat digunakan untuk pemukiman bagi penduduk yang tertarik ke suatu lokasi tertentu. Ia menamakannya sebagai kapasitas tanah milik (*holding capacity*) dari suatu wilayah (Gaspers, 1990:122).

### 2.2.6 Konsep Indeks Williamson

Membahas kesenjangan antar wilayah ada dua teori yang perlu diperhatikan, yaitu (Budiharsono, 1989:72) :

1. *generative growth theory* menyatakan bahwa pada saat perekonomian nasional bertambah mantap, banyak persoalan ekonomi yang dapat diselesaikan. Beberapa wilayah tumbuh lebih cepat daripada wilayah lainnya, masalah distribusi dan

redistribusi menjadi tidak terlalu penting. Kata lain, laju pertumbuhan ekonomi nasional akan lebih cepat apabila laju pertumbuhan ekonomi wilayah terbelakang ditingkatkan;

2. *competitive growth theory* berdasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan ekonomi nasional ditentukan oleh beberapa kekuatan eksogen. Kemudian laju pertumbuhan tersebut seolah-olah terbagi ke beberapa wilayah. Situasi ini terjadi apabila laju pertumbuhan nasional rendah.

Perkembangan pembangunan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain seharusnya adalah sama. Tetapi pada kenyataannya perbedaan itu tidak hanya nampak jelas tetapi juga cenderung untuk terus tumbuh, ini dapat dilihat dari perbedaan pendapatannya. Dengan menggunakan ukuran seperti indeks Williamson akan dapat diketahui perbedaan tingkat pendapatan daerah dalam proses pembangunan (Nuryasman, 1996:249).

$$V_w = \sqrt{\frac{\sum(Y_i - \bar{Y})^2 f_i/n}{\bar{Y}}}$$

Dimana :

- $V_w$  : tingkat disparitas tertimbang
- $Y_i$  : pendapatan perkapita kecamatan daerah belakang (rupiah)
- $\bar{Y}$  : pendapatan perkapita daerah pusat pertumbuhan (rupiah)
- $f_i$  : jumlah penduduk kecamatan daerah belakang (orang)
- $n$  : jumlah penduduk daerah pusat pertumbuhan (orang)

Indeks Williamson memberikan indikasi apabila nilainya semakin mendekati angka satu, maka akan semakin timpang pembangunan suatu kawasan atau berarti ada kecenderungan terjadi kesenjangan pendapatan.

### III. METODE PENELITIAN



#### 3.1 Rancangan Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

##### 3.1.2 Unit Penelitian

Unit penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah aktivitas di pusat pertumbuhan dilihat dari peranan sektor ekonomi di Kabupaten Jember terhadap Produk Domestik Regional Bruto di daerah belakang serta kesenjangan pendapatan antar daerah terhadap rencana pengembangan wilayah daerah belakang (*hinterland*).

#### 3.2 Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mencatat data yang tersedia di beberapa instansi pemerintah yang telah disusun dengan baik dan siap diolah. Instansi yang dimaksud antara lain adalah Kantor Bappeda Kabupaten Jember, Kantor Statistik Kabupaten Jember, dan melalui studi pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder berjenis data *cross section*.

#### 3.3 Metode Analisis Data

1. Untuk mengetahui peranan pusat pertumbuhan terhadap pengembangan daerah belakang dapat digunakan pendekatan analisis indeks gravitasi dan analisis indeks aksesibilitas.

a. Analisis Indeks Gravitasi

Analisis ini untuk menjelaskan besarnya mobilitas penduduk dari daerah belakang ke pusat pertumbuhan dengan menggunakan rumus (Bintarto, 1982:80).

$$I_{12} = a \frac{P_1 P_2}{(J_{12})^b}$$

Dimana :

- $I_{12}$  : interaksi antara pusat pertumbuhan dan daerah belakang
- $P_1$  : jumlah penduduk pusat pertumbuhan
- $P_2$  : jumlah penduduk daerah belakang
- $J_{12}$  : jarak antara pusat pertumbuhan dan daerah belakang (km)
- $a$  : tetapan gravitasi yang besarnya 1
- $b$  : eksponen jarak yang besarnya 2

b. Analisis Indeks Aksesibilitas

Analisis ini digunakan untuk menentukan daya tarik setiap wilayah didasarkan pada akses angkutan yang bekerja, artinya seberapa besar angkutan yang bekerja yang ada di pusat pertumbuhan sehingga akan menarik populasi dari daerah belakang, dengan menggunakan rumus (Gaspers, 1990:121) :

$$A_{ij} = \frac{E_j}{(d_{ij})^b}$$

Dimana :

- $A_{ij}$  : indeks aksesibilitas dari daerah belakang dalam hubungannya dengan daerah pusat pertumbuhan
- $E_j$  : total angkutan kerja yang bekerja dalam daerah pusat pertumbuhan (orang)
- $d_{ij}$  : jarak antara daerah belakang dan pusat pertumbuhan (km)
- $b$  : eksponen jarak yang besarnya 2

Semakin besar indeks gravitasi dan indeks aksesibilitas, berarti semakin besar pula fungsi pusat pertumbuhan sebagai pusat pelayanan daerah sekitarnya, sehingga semakin besar pula pengaruh pusat pertumbuhan bagi pengembangan daerah belakang. Untuk indeks gravitasi dinyatakan besar apabila nilainya melebihi enam digit dan indeks aksesibilitas jika nilainya lebih dari satu.

2. Untuk mengetahui kesenjangan tingkat pendapatan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang digunakan analisis indeks Williamson. Indeks ini digunakan untuk mengukur koefisien tertimbang suatu daerah tentang kesenjangan pendapatan dalam proses pembangunan dengan menggunakan rumus (Nuryasman, 1996:152) :

$$V_w = \sqrt{\frac{\sum(Y_i - \bar{Y})^2 f_i/n}{\bar{Y}}}$$

Dimana :

$V_w$  : tingkat disparitas tertimbang

$Y_i$  : pendapatan perkapita kecamatan daerah belakang (rupiah)

$\bar{Y}$  : pendapatan perkapita daerah pusat pertumbuhan (rupiah)

$f_i$  : jumlah penduduk kecamatan daerah belakang (orang)

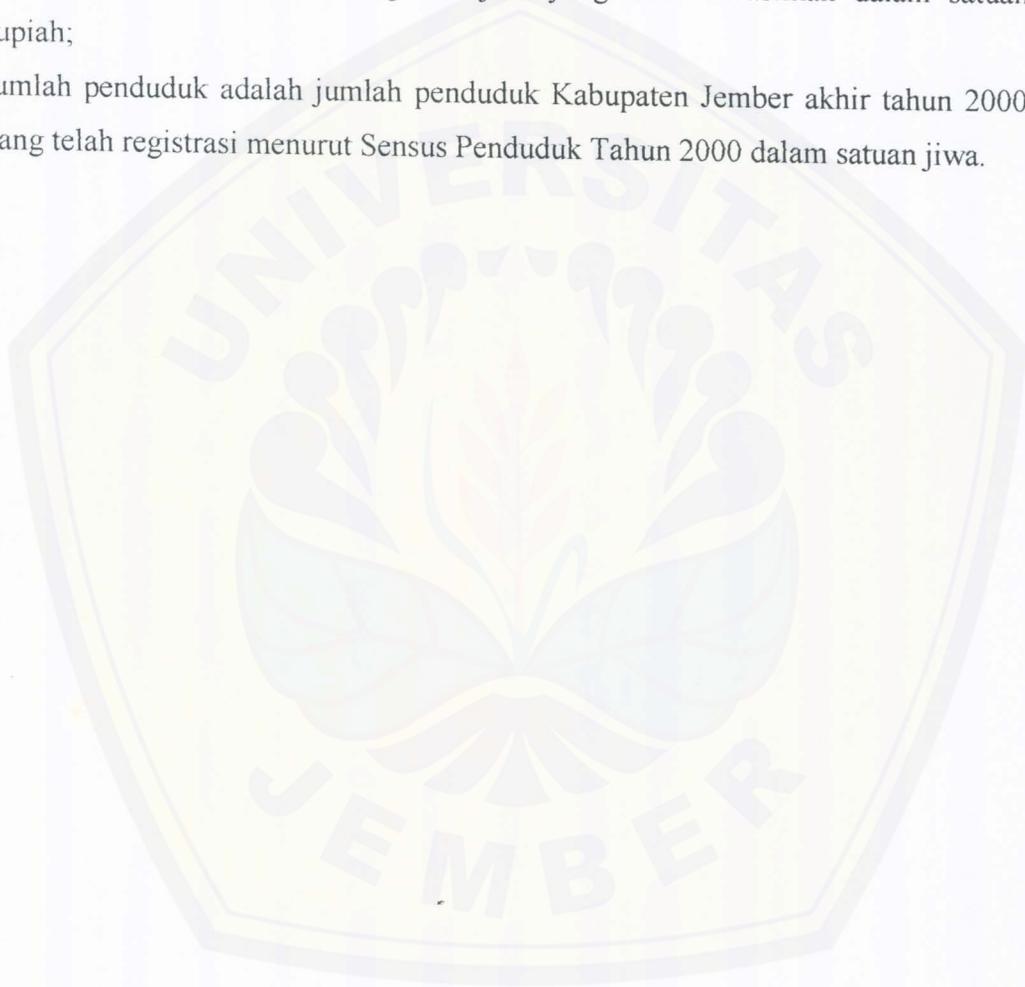
$n$  : jumlah penduduk daerah pusat pertumbuhan (orang)

Indeks Williamson memberikan indikasi apabila nilainya semakin mendekati angka satu, maka akan semakin timpang pembangunan suatu kawasan atau berarti ada kecenderungan terjadi kesenjangan pendapatan.

### 3.4 Definisi Variabel Operasional dan Pengukurannya

Menghindari terjadinya salah pengertian dalam tulisan ini serta mencegah meluasnya permasalahan, maka perlu adanya batasan-batasan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan batasan pengertian judul :

1. jumlah tenaga kerja dalam modal aksesibilitas adalah jumlah penduduk usia produktif yaitu 10-65 tahun dalam satuan orang;
2. angkatan kerja yang bekerja adalah angkatan kerja / jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang sudah bekerja di suatu wilayah dalam satuan orang;
3. pendapatan perkapita adalah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk Kabupaten Jember atas barang dan jasa yang telah dihasilkan dalam satuan rupiah;
4. jumlah penduduk adalah jumlah penduduk Kabupaten Jember akhir tahun 2000 yang telah registrasi menurut Sensus Penduduk Tahun 2000 dalam satuan jiwa.



## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN



### 4.1 Gambaran Umum

#### 4.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Jember dengan luas 3.293,34 km<sup>2</sup> atau 329.333,94 Ha terletak pada posisi 6° 27' 9" sampai dengan 7° 14' 33" Bujur Timur dan 7° 59' 6" sampai dengan 8° 33' 56" Lintang Selatan, berbentuk daratan ngarai yang subur pada bagian tengah dan Selatan dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas Utara dan Timur, serta Samudra Indonesia sepanjang batas Selatan dengan Pulau Nusabarong yang merupakan satu-satunya pulau yang ada di wilayah Jember. Batas wilayah Kabupaten Jember adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan sebagian kecil Kabupaten Probolinggo, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang.

Secara topografi Kabupaten Jember berada pada ketinggian 0 – 3.300 meter di atas permukaan laut dengan iklim sedang. Daerah yang memiliki kawasan terluas adalah daerah dengan ketinggian antara 100-500 meter di atas permukaan laut yaitu 23.442,42 Ha (7,11%). Daerah di Jember mempunyai banyak sungai, gunung, bukit (gumuk) tidak kurang dari 91 buah, ditambah dengan daratan ngarai yang subur dan air mudah diperoleh baik untuk keperluan irigasi dan keperluan sehari-hari. Kabupaten Jember terbagi dalam berbagai kawasan yakni perkampungan, sawah, tegalan, kebun campuran, perkebunan rakyat atau swasta, danau, tanah kritis, dan hutan.

Berdasarkan pembagian wilayah administrasi, Kabupaten Jember terbagi menjadi delapan Pembantu Bupati, 31 wilayah Kecamatan dengan mencakup 218 wilayah pemerintahan desa dan 22 wilayah pemerintahan kelurahan. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Jember dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Wilayah Administrasi Kabupaten Jember Tahun 2000

No	Pembantu Bupati	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1.	Kotatif	1. Kaliwates	7	-
		2. Patrang	7	-
		3. Sumpalsari	8	-
2.	Arjasa	1. Arjasa	-	6
		2. Jelbuk	-	6
		3. Pakusari	-	7
		4. Sukowono	-	12
3.	Kalisat	1. Kalisat	-	12
		2. Ledokombo	-	10
		3. Sumberjambe	-	9
4.	Mayang	1. Mayang	-	7
		2. Silo	-	9
		3. Mumbulsari	-	7
		4. Tempurejo	-	8
5.	Rambipuji	1. Rambipuji	-	8
		2. Jenggawah	-	8
		3. Panti	-	7
		4. Sukorambi	-	5
		5. Ajung	-	6
6.	Tanggul	1. Tanggul	-	8
		2. Semboro	-	6
		3. Sumberbaru	-	10
		4. Bangsalsari	-	11
7.	Kencong	1. Kencong	-	5
		2. Gumukmas	-	7
		3. Umbulsari	-	9
		4. Puger	-	12
		5. Jombang	-	5
8.	Balung	1. Balung	-	8
		2. Wuluhan	-	7
		3. Ambulu	-	7

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, April 2002

#### 4.1.2 Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja

##### a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Jember menurut data Kantor Statistik Jember pada tahun 2000 sebesar 2.162.688 jiwa. Kabupaten Jember ditinjau dari jumlah penduduknya selalu mengalami peningkatan. Jumlah penduduk di Kabupaten Jember pada tahun 1996 sebesar 2.061.877 dan pada tahun 2000 sebesar 2.162.688. Pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Jember selama tahun 1996-2000 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jember Tahun 1996-2000

Tahun	Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan (%)
1996	2.061.877	-
1997	2.078.701	0,82
1998	2.083.068	0,24
1999	2.106.632	1,10
2000	2.162.688	2,26

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, April 2002

Tabel 2 menyatakan bahwa angka pertumbuhan rata-rata penduduk mulai tahun 1996 sampai tahun 2000 relatif kecil yaitu sebesar 0,96% per tahun. Kecenderungan pertumbuhan penduduk yang kecil ini diakibatkan oleh keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Jember. Disamping itu distribusi penduduk tidaklah merata di setiap tempat, akan tetapi pada wilayah yang sudah berkembang terutama di perkotaan terjadi pertumbuhan lebih tinggi. Hal ini terutama disebabkan oleh daya tarik kota yang lebih kuat serta kemampuan tingkat pelayanan umumnya lebih baik dan lebih lengkap.

## b. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Jember sebagian besar adalah kegiatan di sektor pertanian, hal ini disebabkan karena keadaan geografis yang mendukung terutama kondisi tanah yang cukup subur. Lebih dari 50% dari luas keseluruhan Kabupaten Jember adalah tanah pertanian yang terbagi atas sawah dan perkebunan, serta ditunjang oleh iklim dan keberhasilan sistim pertanian sehingga sektor pertanian mampu berkembang stabil. Pembagian penduduk menurut lapangan pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Jember Tahun 2000

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase (%)
1.	Pertanian	451.935	49,56
2.	Industri	82.383	9,03
3.	Perdagangan	189.171	20,74
4.	Jasa-jasa	59.712	6,55
5.	Lainnya	128.706	14,11
Jumlah		911.907	1,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, April 2002

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan penduduk yang mempunyai lapangan pekerjaan di sektor pertanian jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan sektor yang lain sebesar 49,56% lebih dari seluruh jenis lapangan pekerjaan yang ada. Keadaan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jember sangat potensial untuk dikembangkan pertanian produksi menuju pada agrobisnis dan agroindustri. Perdagangan dan industri masih perlu diintensifkan lagi agar mampu sejajar dengan sektor pertanian yang mendominasi struktur perekonomian.

c. Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember tahun 2000 sebanyak 6000 orang, ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 8,52% dibandingkan tahun 1999, sedangkan jumlah lapangan pekerjaan di Kabupaten Jember tahun 2000 sebanyak 2.657 orang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 3.842 orang. Lapangan pekerjaan penduduk Kabupaten Jember masih didominasi sektor pertanian yaitu sebesar 49,56% dari seluruh tenaga kerja di Jember.

Masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Jember disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja, laju pertumbuhan penduduk yang lebih besar dari daya serap pasaran tenaga kerja, serta masih banyaknya tenaga kerja yang kurang siap pakai (*unskilled*). Salah satu upaya pemecahan masalah ketenagakerjaan antara lain ditempuh dengan kebijaksanaan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Kebijakan lain yang ditempuh adalah program transmigrasi.

#### 4.1.3 Kondisi Perekonomian

a. Pendapatan Perkapita

Untuk melihat besarnya pembangunan yang diterima oleh masyarakat dengan adanya pembangunan informasi perkapita yang d. hitung tiap tahun (satu periode) dapat dipakai sebagai tolak ukur sehingga mencerminkan adanya perolehan yang sesungguhnya telah diterima masyarakat, dengan kata lain hal-hal yang bersifat sosial atau kualitatif kurang diperhitungkan. Dengan pedoman perhitungan pendapatan perkapita, keadaan Kabupaten Jember dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 1993 di Kabupaten Jember Tahun 1996-2000

No	Tahun	Pendapatan Perkapita (Ribuan Rp)	Pertumbuhan (%)
1.	1996	984,35	-
2.	1997	1.021,58	6,64
3.	1998	927,29	-0,16
4.	1999	938,50	1,19
5.	2000	966,27	2,87

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, April 2002

Dari Tabel 4 dapat kita lihat pada tahun 1997 pertumbuhan pendapatan perkapita di Kabupaten Jember sebesar 6,64% kemudian mengalami fluktuasi tajam pada tahun 1998 sebesar -0,16% disebabkan krisis ekonomi melanda Indonesia. Tahun 2000 pertumbuhan pendapatan perkapita Kabupaten Jember sebesar 2,87% meningkat 1,68% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan oleh dua faktor yaitu penambahan produksi fisik dan kenaikan harga barang yang membentuk produksi.

b. Perkembangan Perekonomian Daerah

Data PDRB mempunyai peranan penting untuk menganalisis pembangunan di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangannya sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, karena peningkatannya berarti suatu keberhasilan dari proses pembangunan.

Di Kabupaten Jember kegiatan ekonomi banyak berpusat pada kegiatan di sektor pertanian, dimana sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap total PDRB Kabupaten Jember, yaitu sebesar Rp. 0,921 milyar pada tahun 2000, berikutnya disusul oleh sektor perdagangan sebesar Rp. 0,478 milyar. Untuk mengetahui distribusi semua sektor terhadap PDRB Kabupaten Jember dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1996-2000. (dalam ribuan rupiah)

No	Lapangan Usaha	1996	1997	1998	1999	2000
1.	Pertanian	972.804,99	991.547,77	847.647,97	881.730,32	921.048,53
2.	Pertambangan dan penggalian	10.415,47	10.454,92	10.283,42	10.380,95	10.583,33
3.	Industri pengolahan	152.422,69	158.061,74	147.382,56	149.443,99	152.565,44
4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	24.700,39	28.142,03	28.710,67	32.844,80	34.869,31
5.	Bangunan	88.172,04	89.965,93	57.966,83	59.137,93	59.758,51
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	418.113,04	455.455,50	454.294,90	463.618,06	478.069,00
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	130.006,19	139.392,02	143.530,47	146.077,54	149.494,69
8.	Keuangan, Persewaan Bangunan dan jasa Perusahaan	145.369,27	156.083,05	151.548,04	134.163,12	116.992,95
9.	Jasa-jasa	228.695,16	240.227,56	256.011,14	259.588,54	264.675,59
	PDRB	2.170.699,24	2.269.330,52	2.097.376,00	2.136.985,25	2.208.057,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, April 2002.

Secara riil pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Jember dilihat dari penghitungan PDRB mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya, setelah adanya krisis yang berkepanjangan. Pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember menunjukkan tanda-tanda pulih kembali, yaitu dengan tumbuh sebesar 3,33% dengan tingkat inflasi sebesar 9,00%.

#### c. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Struktur ekonomi Kabupaten Jember tahun 2000 masih tetap didominasi oleh tiga sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa. Sebagai daerah yang bercorak agraris sangatlah pantas apabila sektor

pertanian menjadi sektor utama. Kontribusi sektor pertanian menyumbang pembentukan nilai total PDRB sebesar 30,28 persen. Kemudian sektor lain yang cukup berpengaruh adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor tersebut mampu menyumbang sebesar 18,71 persen terhadap total nilai PDRB. Sektor jasa-jasa menempati urutan ketiga sebagai sektor penyumbang nilai PDRB, sumbangan sektor jasa sebesar 8,49 persen. Untuk mengetahui lebih jelas pertumbuhan ekonomi sektoral dari tahun 1997-2000 dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 di Kabupaten Jember Tahun 1997-2000 (dalam %)

No	Sektor	1997	1998	1999	2000
1.	Pertanian	1,89	-16,97	3,86	4,27
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,38	-1,67	0,94	1,91
3.	Industri Pengolahan	3,57	-7,26	1,38	2,05
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	12,23	1,98	12,59	5,81
5.	Bangunan	1,99	-55,20	1,98	1,04
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,19	-0,26	2,01	3,02
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	6,73	2,88	1,74	2,28
8.	Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan	6,86	-2,99	-12,96	-14,68
9.	Jasa-jasa	4,80	6,16	1,38	1,92

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember (data diolah), Mei 2002

Tabel 6 menunjukkan sektor pertanian yang berperan paling besar terhadap total PDRB pada tahun 2000 mampu naik sebesar 4,27%. Sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 2,05%, sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih tumbuh sebesar 5,81% lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 12,59%. Sektor bangunan mempunyai pertumbuhan 1,04%.

Sektor perdagangan mempunyai pertumbuhan yang relatif tinggi yaitu sebesar 3,02% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,01%. Sektor perdagangan ini mempunyai andil terbesar kedua setelah sektor pertanian. Sektor pertambangan dan penggalian hanya tumbuh 0,94% pada tahun 1999 dan naik menjadi 1,91% pada tahun 2000.

Dalam kelompok tersier, sektor keuangan mengalami penurunan tajam dari semua sektor yang ada yaitu sebesar -12,96% pada tahun 1999 dan -14,68% pada tahun 2000. Sektor jasa-jasa mempunyai pertumbuhan sebesar 1,92%, sedangkan sektor pengangkutan dan komunikasi mempunyai pertumbuhan sebesar 2,28% pada tahun 2000.

#### 4.1.4 Kebijakan Pembangunan Kabupaten Jember

Kebijakan pembangunan wilayah di Kabupaten Jember dilaksanakan melalui kebijakan pembangunan wilayah dan tata ruang pembangunan.

##### a. Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang Pembangunan

Mengingat bahwa pembangunan wilayah Kabupaten Jember merupakan bagian pembangunan daerah Propinsi Jawa Timur, yang sekaligus bagian integral dari pembangunan nasional, maka perlu dipelihara keserasian dan keselamatan antara pembangunan daerah dan pembangunan nasional, untuk itu pada setiap kegiatan pembangunan daerah selain memperhatikan kondisi, potensi dari prioritas daerah di Kabupaten Jember diusahakan terpeliharanya laju pembangunan antar wilayah, sehingga dapat memperkecil perbedaan tingkat pertumbuhan antara wilayah yang satu dengan yang lain. Untuk bagian wilayah yang masih terbelakang dan kurang berkembang perlu diberikan prioritas pengembangan dan motivasi pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan wilayahnya. Untuk menunjang kebijakan pembangunan wilayah di Kabupaten Jember maka dibagi menjadi empat Sub Satuan Wilayah

Pembangunan (SSWP) yaitu sebagai berikut (Bappeda Kabupaten Jember, 1992/1993 : 12) :

- 1) SSWP Kabupaten Jember Bagian Utara-Timur yang meliputi wilayah kerja Pembantu Bupati Arjasa, Kalisat, Mayang yang berpusat di Kalisat. Prioritas pembangunan di wilayah ini adalah sektor pendidikan, perumahan, perkebunan, kesehatan, peternakan, pertanian tanaman pangan dan industri kecil;
- 2) SSWP Kabupaten Jember Bagian Tengah yang meliputi Kota Administratif Jember yaitu Kaliwates, Patrang, dan Sumpalsari. Prioritas pembangunan di wilayah ini adalah prasarana pendidikan perkotaan, perdagangan, perumahan, perhubungan darat, dan aneka industri;
- 3) SSWP Kabupaten Jember Bagian Barat-Utara yang meliputi wilayah kerja Pembantu Bupati Rambipuji dan Tanggul yang berpusat di Tanggul. Prioritas pembangunan di wilayah ini adalah sektor pendidikan, perumahan, perkebunan, kesehatan, perdagangan dan industri kecil;
- 4) SSWP Kabupaten Jember Bagian Barat-Selatan yang meliputi wilayah kerja Pembantu Bupati Balung dan Kencong berpusat di Balung. Prioritas pembangunan di wilayah ini adalah sektor pertanian tanaman pangan, industri kecil, pariwisata dan perdagangan.

Jember berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah di seluruh Kabupaten Jember dengan kegiatannya pusat pemasaran, distribusi, pusat pelayanan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, pusat pemerintahan dan pengembangan wilayah. Untuk mendukung kegiatan perencanaan pembangunan di SSWP masih diperlukan berbagai kemudahan terutama dalam mempertimbangkan skala prioritas yang harus diberikan pada program-program atau proyek-proyek tertentu berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah. Selanjutnya agar pembangunan ekonomi dapat berlangsung secara lebih merata, maka dalam kaitan pembangunan daerah lima tahunan (Pelita), Kabupaten Jember diklasifikasikan dalam wilayah pengembangan sebagai berikut :

- 1) wilayah yang rawan terhadap ancaman bencana alam banjir;
- 2) wilayah yang rawan terhadap ancaman bencana kekeringan atau tandus dan terisolir;
- 3) wilayah pertanian dalam rangka pendayagunaan aliran sungai;
- 4) wilayah perluasan/penataan kota;
- 5) wilayah perintisan obyek-obyek wisata.

b. Arah dan Sasaran Pengembangan Wilayah di Kabupaten Jember

Pembangunan wilayah adalah salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan, dimana disiplin tata ruang dimasukkan ke dalamnya sebagai landasan pokok. Dengan menerapkan pendekatan pengembangan wilayah tersebut diharapkan akan dapat dicapai hal-hal sebagai berikut (Bappeda Kabupaten Jember, 1992/1993 : 63) :

- 1) tingkat kemudahan yang lebih tinggi dalam perencanaan pembangunan wilayah;
- 2) ketergantungan pembangunan, baik sekoral maupun regional terutama dalam hal ketepatan lokasi dan penjadualan kegiatan bagi pelaksanaan program-program atau proyek-proyek pembangunan wilayah;
- 3) semakin kokoh kesatuan ekonomi, baik secara regional maupun nasional;
- 4) kemudahan dalam hal pemerataan pembangunan, sehingga terciptalah keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat kemakmurannya;
- 5) efisiensi pertumbuhan wilayah dimana tujuan pemerataan dan keseimbangan adalah titik sentralnya;
- 6) peningkatan kesejahteraan sosial termasuk kesejahteraan keluarga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran serta kemampuan setiap anggota masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan;
- 7) untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, program utamanya ditekankan pada pengendalian lingkungan hidup yang selalu ditingkatkan;

- 8) pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai saat ini adalah nasional yang harus dipelihara secara cermat.

c. Tujuan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Jember

Tujuan yang hendak dicapai melalui penataan SSWP adalah (Bappeda Kabupaten Jember, 1992/1993 : 12) :

- 1) mengusahakan pemerataan pembangunan yang serasi di dalam suatu SSWP dan antar SWP agar perbedaan tingkat kemakmuran antara wilayah yang maju dengan wilayah yang masih terbelakang dapat diperkecil;
- 2) mengusahakan dan mengarahkan kegiatan pembangunan daerah atau wilayah sesuai dengan kondisi dan potensi fungsi yang terdapat di setiap sub SWP;
- 3) mengembangkan hubungan ekonomi antar sub SWP secara saling menguntungkan sehingga terjalin interaksi yang harmonis dalam kegiatan ekonomi sosial, budaya dan politik / keamanan sehingga terwujud struktur ekonomi regional yang kuat dan mampu menunjang kesatuan ekonomi nasional yang kokoh;
- 4) mempertajam prioritas pembangunan sehingga memungkinkan terjangkaunya wilayah-wilayah terbelakang, kawasan kritis dan pantai oleh kegiatan pembangunan, antara lain melalui program-program khusus dengan memperhatikan sepenuhnya upaya penyelamatan kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

## 4.2 Hasil Analisis

### 4.2.1 Analisis Peranan Pusat Pertumbuhan terhadap Pengembangan Daerah Belakang

Untuk menganalisis peranan pusat pertumbuhan terhadap pengembangan daerah belakang di Kabupaten Jember tahun 2000, digunakan data yang berasal dari tabel analisis indeks gravitasi dan indeks aksesibilitas. Dengan menggunakan analisis

indeks gravitasi dan indeks aksesibilitas dapat ditunjukkan tingkat interaksi antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang.

Berangkat dari kerangka pemikiran Glasson (1991:147) bahwa dewasa ini belum ada alat analisis dalam telaah ekonomi regional yang memiliki validitas tinggi dalam menggambarkan peranan pusat pertumbuhan terhadap pengembangan daerah belakangnya, maka penelitian ini diarahkan pada perilaku kawasan, oleh sebab itu analisis yang digunakan yaitu analisis yang mampu menggambarkan perilaku kawasan tersebut yang digambarkan melalui intensitas interaksi antar kawasan itu sendiri. Interaksi yang dimaksud misalnya interaksi penduduk antar kawasan, interaksi berupa aliran sumberdaya baik modal, manusia, keuangan dan lain-lain.

a. Analisis Indeks Gravitasi

Dalam analisis indeks gravitasi hubungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dipersamakan dengan hubungan antara massa-massa wilayah yang mempunyai daya tarik sehingga terjadi saling mempengaruhi (interaksi) antar daerah sebagai perwujudan kekuatan tarik menarik antar daerah. Semakin besar fungsi suatu kecamatan maka sarana yang ada akan lebih besar pula, hal ini akan mengakibatkan timbulnya aglomerasi yaitu adanya pemusatan kegiatan-kegiatan di tempat-tempat yang mempunyai sarana lebih lengkap. Tempat-tempat yang sarananya lebih lengkap akan memiliki daya tarik yang lebih kuat dibandingkan dengan daerah yang lain.

Kekuatan tarik menarik (interaksi) antar wilayah di Kabupaten Jember dapat dilihat dari hasil perhitungan analisis indeks gravitasi (lampiran 5) dan indeks aksesibilitas (lampiran 6) pada Tabel 7.

Tabel 7 Pusat Pertumbuhan terhadap Daerah Belakang di Kabupaten Jember Tahun 2002

No	Sub Satuan Wilayah Pembangunan	Indeks Gravitasi	Indeks Akseibilitas
1.	Jember Utara Timur terpusat di Kalisat		
	Ledokombo	9.563.880,585	72,800
	Sumberjambe	5.876.634,371	46,592
	Arjasa	36.837.573,016	455,000
	Jelbuk	13.742.181,035	202,222
	Pakusari	25.002.616,440	291,200
	Sukowono	36.499.795,490	291,200
	Mayang	117.225.250,920	1.164,800
	Silo	61.048.654,820	291,200
	Mumbulsari	13.126.537,557	100,761
	Tempurejo	1.890.934,475	11,648
2.	Jember Tengah berpusat di Kaliwates		
	Sumbersari	97.342.127,140	408,570
	Patrang	83.385.083,600	408,570
3.	Jember Barat Utara berpusat di Tanggul		
	Semboro	95.318.532,889	928,111
	Sumberbaru	74.406.319,520	334,120
	Bangsalsari	80.470.198,400	334,120
	Rambipuji	16.332.262,060	103,123
	Jenggawah	5.734.573,469	32,629
	Panti	8.934.820,033	69,033
	Sukorambi	3.184.353,731	39,729
	Ajung	5.901.356,804	39,729
4.	Jember Barat Selatan berpusat di Balung		
	Wuluhan	158.234.912,000	653,816
	Ambulu	43.513.948,402	189,568
	Kencong	7.140.416,852	47,392
	Gumukmas	8.421.316,444	72,646
	Umbulari	35.705.156,667	222,476
	Puger	30.190.653,281	125,145
	Jombang	7.430.477,886	33,337

Sumber : Lampiran 5 dan 6

Pada Tabel 7 memperlihatkan hasil analisis indeks gravitasi di Kabupaten Jember tahun 2000, dari hasil perhitungan dapat dijelaskan bahwa Pusat Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) mempunyai daya tarik yang kuat terhadap daerah belakangnya terutama bagi daerah belakang yang mempunyai jarak cukup dekat dengan pusat pertumbuhan seperti Kalisat, Mayang (lima kilometer), Tanggul – Semboro (enam kilometer), Balung – Wuluhan (tujuh kilometer). Jarak antar wilayah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi angka indeks gravitasi, semakin dekat jarak tempuh antar daerah maka semakin tinggi pula angka indeks gravitasi sehingga tingkat interaksi akan semakin kuat.

Kecamatan SSWP dan daerah belakang yang mempunyai interaksi (daya tarik) yang paling kuat adalah SSWP Jember bagian Barat Selatan dengan pusat pertumbuhan di Kecamatan Balung dan Kecamatan Wuluhan sebagai daerah belakangnya, mempunyai indeks gravitasi tertinggi sebesar 158.234.912. Kecamatan SSWP yang terlemah interaksinya adalah SSWP Jember bagian Utara Timur dengan pusat pertumbuhan di Kecamatan Kalisat dan Kecamatan Tempurejo sebagai daerah belakangnya, mempunyai indeks gravitasi sebesar 1.890.934,475.

Dari nilai-nilai indeks gravitasi dapat diketahui bahwa secara keseluruhan untuk Kabupaten Jember, SSWP yang ada memiliki daya interaksi yang tinggi berdasarkan hasil analisis indeks gravitasi yang mempunyai nilai rata-rata terdiri dari delapan angka didepan koma (di atas enam digit). Interaksi yang tinggi menggambarkan adanya perilaku kawasan yang saling mempengaruhi dan terpengaruhi oleh pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya. Dapat dikatakan bahwa adanya sarana di pusat-pusat pertumbuhan dimanfaatkan oleh penduduk daerah belakang, sehingga pusat pertumbuhan mempunyai peranan dalam penyediaan pelayanan bagi daerah belakang.

#### b. Analisis Indeks Aksesibilitas

Daya tarik yang besar dari pusat pertumbuhan terhadap daerah belakangnya dapat disebabkan juga oleh tingginya angka indeks aksesibilitas. Indeks aksesibilitas

menggambarkan berapa besar aksesibilitas angkatan kerja yang bekerja (penduduk produktif) di suatu wilayah dalam hal ini Kecamatan pusat pertumbuhan. Keberadaan angkata kerja yang bekerja merupakan salah satu daya tarik wilayah sehingga mampu memberikan peranan terhadap wilayah yang lain. Hasil perhitungan indeks aksesibilitas masing-masing Kecamatan di Kabupaten Jember tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel 7. Kecamatan SSWP Jember bagian Utara Timur dengan pusat pertumbuhan di Kecamatan Kalisat dengan Kecamatan Mayang sebagai daerah belakangnya mempunyai nilai indeks aksesibilitas tertinggi sebesar 1164,8 dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja sebesar 29.120 orang. Kecamatan SSWP yang mempunyai angka indeks terendah juga terdapat pada SSWP Jember Utara Timur dengan pusat pertumbuhan di Kalisat tetapi daerah belakangnya adalah Kecamatan Tempurejo sebesar 11,648 dengan total angkatan kerja yang bekerja sebesar 29.120 orang.

Dari hasil perhitungan analisis indeks aksesibilitas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan angka indeks aksesibilitas di setiap Kecamatan Kabupaten Jember tergolong tinggi dengan rata-rata sebesar 258,133. Dapat dikatakan bahwa pusat pertumbuhan di Kabupaten Jember mampu memberikan peranan terhadap daerah belakangnya dilihat dari akses jumlah angkatan kerja yang bekerja.

#### **4.2.2 Analisis Kesenjangan Pendapatan antara Pusat Pertumbuhan dengan Daerah Belakang**

Peranan pusat pertumbuhan bagi pengembangan wilayah dapat ditunjukkan dengan ada tidaknya ketimpangan pendapat pada pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya. Kesenjangan pendapat merupakan salah satu indikator tentang efektif tidaknya pusat pertumbuhan akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan daerah belakang.

Tingkat kesenjangan pendapatan suatu daerah dapat dilihat dari nilai indeks Williamson. Kriteria nilai indeks Williamson semakin mendekati angka nol berarti kesenjangan semakin kecil, sebaliknya semakin mendekati angka satu berarti tingkat

kesenjangan besar. Berdasarkan data lampiran 7, maka keadaan tingkat kesenjangan pendapatan pusat pertumbuhan dengan daerah belakang di Kabupaten Jember tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Perhitungan Indeks Williamson di Kabupaten Jember Tahun 2000

No	Sub Satuan Wilayah Pembangunan	Indeks Williamson	Keterangan
1.	Kalisat (Jember bagian Utara Timur)	0,874	Besar
2.	Kaliwates (Jember bagian Tengah)	0,802	Besar
3.	Tanggul (Jember bagian Barat Utara)	0,773	Besar
4.	Balung (Jember bagian Barat Selatan)	0,724	Besar
	Rata-rata	0,793	Besar

Sumber : Lampiran 7

Dari hasil perhitungan indeks Williamson dapat diketahui pusat pertumbuhan tiap-tiap SSWP mempunyai nilai indeks Williamson besar ditunjukkan dengan nilai rata-rata indeks Williamson sebesar 0,793. SSWP Jember bagian Utara Timur dengan pusat pertumbuhan di Kecamatan Kalisat memiliki nilai indeks Williamson tertinggi sebesar 0,874. Kemudian disusul oleh SSWP Jember bagian Tengah dengan Kecamatan Kaliwates sebagai pusat pertumbuhan memiliki nilai indeks Williamson sebesar 0,802, dan urutan ketiga diduduki SSWP Jember bagian Barat Utara yang berpusat di Kecamatan Tanggul memiliki nilai indeks Williamson sebesar 0,773 SSWP Jember bagian Barat Selatan yang mempunyai nilai indeks Williamson terendah sebesar 0,724.

Secara keseluruhan kesenjangan pendapatan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang di Kabupaten Jember besar, adanya tingkat kesenjangan yang besar dalam perhitungan analisis indeks Williamson di setiap pusat pertumbuhan disebabkan oleh tidak seimbangnya potensi antara Kecamatan pusat pertumbuhan dengan Kecamatan daerah belakangnya, antara lain ketidakseimbangan sumber daya terutama sumber daya manusia, dapat juga disebabkan oleh perbedaan masing-masing wilayah dalam mengambil keputusan kebijaksanaan pembangunan, adanya

*double accounting* (seperti para pencari kerja dimana tempat tinggalnya di wilayah A mencari kerja di wilayah B, sehingga ada dua perhitungan pendapatan yaitu di daerah A dan daerah B), letak geografis masing-masing wilayah dalam mendukung peningkatan pendapatan (seperti daerah pantai, daerah yang tanahnya subur), serta jarak antar wilayah cukup jauh sehingga memperlemah interaksi antar wilayah tersebut yang berakibat pada kurang efektifnya proses mempengaruhi dan terpengaruhi.

### 4.3 Pembahasan

Proses perkembangan daerah terjadi akibat interaksi ruang berdasarkan prinsip aglomerasi atau skala ekonomi menuju efisiensi. Ekonomi pusat pertumbuhan akan menjadi pusat kegiatannya sendiri dan pusat kegiatan dari daerah sekitarnya. Berarti daerah sekitarnya yang lebih kecil sangat tergantung pada tersedianya kegiatan yang ada pada pusat pertumbuhan sesuai dengan teori tempat sentral. Dalam teori pusat pertumbuhan, untuk menghubungkan pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya dan mendefinisikan pusat pertumbuhan sebagai suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi daerah belakangnya, maka suatu daerah harus dipandang dalam hubungannya dengan daerah sekitarnya dengan dasar saling menguntungkan. Daerah harus melaksanakan fungsinya sebagai pusat pelayanan seperti pemerintahan, perdagangan, pengolahan barang, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Fungsi tersebut meliputi fungsi intern dan fungsi ekstern. Fungsi intern adalah pelayanan untuk penduduk daerah itu sendiri dan fungsi ekstern adalah pelayanan untuk penduduk daerah sekitarnya.

Sesuai dengan teori pusat pertumbuhan, Kabupaten Jember dalam kebijaksanaan pembangunan terbagi menjadi empat SSWP. Dasar pembagian SSWP memperhatikan potensi masing-masing wilayah yang terbagi menjadi pusat pertumbuhan dan daerah belakang. Daerah yang menjadi pusat pertumbuhan adalah daerah yang memiliki potensi lebih dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang

diperlukan oleh daerah belakangnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Myrdall (dalam Nuryasiman, 1996:243) bahwa tempat-tempat yang menarik adalah tempat-tempat yang memiliki dan membina kondisi-kondisi alamiah yang sangat baik pemusatan kegiatan perekonomian, sehingga daerah tersebut memiliki keuntungan komparatif dibandingkan dengan daerah lainnya. Daerah yang menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Jember yaitu Kecamatan Kaliwates, Kalisat, Tanggul dan Balung mempunyai sarana dan prasarana lebih banyak daripada daerah sekitarnya.

Analisis indeks gravitasi yang diadaptasi dari hukum Newton yaitu gaya tarik menarik berbanding lurus dengan massa-massanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Daerah dianggap sebagai suatu massa, hubungan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain dipersamakan dengan hubungan antara massa-massa wilayah yang mempunyai daya tarik sehingga saling mempengaruhi antar wilayah sebagai perwujudan kekuatan interaksi antar wilayah. Dengan menggunakan analisis indeks gravitasi dapat mengukur tingkat interaksi antara dua wilayah, sedangkan analisis indeks aksesibilitas pada dasarnya merupakan modifikasi dari analisis indeks gravitasi (Sumaadmadja, 1988:148).

Kriteria dari indeks gravitasi semakin besar angka indeks (nilai diatas enam angka) maka dinyatakan kuat interaksi antar wilayah. Berarti ditinjau dari segi perilaku kawasan menggambarkan tingginya peranan dalam arti kawasan yang mempengaruhi dan dipengaruhi kuat lemahnya interaksi antar ruang, seperti nampak dalam hasil perhitungan analisis indeks gravitasi. SSWP Jember bagian Barat Selatan dengan pusat pertumbuhan di Kecamatan Balung dan Kecamatan Wuluhan sebagai daerah belakangnya menempati urutan pertama dan kuatnya tingkat interaksi antar ruang, hal ini dapat dipengaruhi oleh jarak yang dekat antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya dan jumlah penduduk yang besar. Pada SSWP Jember bagian Utara Timur dengan Kecamatan Kalisat sebagai pusat pertumbuhan dan Kecamatan Tempurejo sebagai daerah belakangnya menempati urutan terendah dalam kuatnya tingkat interaksi, karena jarak antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang yang cukup jauh (50 km).

Berdasarkan hasil perhitungan analisis indeks gravitasi, keseluruhan pusat pertumbuhan yang ada di Kabupaten Jember mempunyai tingkat interaksi yang tinggi, berarti pusat pertumbuhan di Kabupaten Jember mampu berperan dalam pengembangan wilayah di daerah belakangnya. Dari hasil nilai indeks gravitasi dapat membuktikan kebenaran teori pusat pertumbuhan yang menyatakan bahwa keperluan untuk memusatkan investasi dalam sejumlah sektor dan tempat yang kecil, diharapkan pembangunan akan menjalar pada sektor-sektor lain di seluruh wilayah, dengan demikian sumber-sumber material dan manusiawi yang digunakan dapat dimanfaatkan lebih baik dan lebih efisien (Glasson, 1991:157).

Aksesibilitas angkatan kerja yang bekerja menggambarkan tingkat interaksi atau daya tarik suatu wilayah. Semakin banyak angkatan kerja yang bekerja di dalam suatu wilayah berarti akan memperlihatkan sumber daya manusia yang potensial yang ditunjukkan oleh tingginya jumlah penduduk usia produktif yang benar-benar bekerja.

Hasil perhitungan analisis indeks aksesibilitas memperlihatkan bahwa tingkat interaksi tertinggi terdapat di SSWP Jember bagian Utara Timur dengan pusat pertumbuhan di Kecamatan Kalisat dengan daerah belakang Kecamatan Mayang. Tingginya tingkat interaksi tersebut dipengaruhi oleh jarak yang dekat antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya (Kalisat-Mayang berjarak 5 km), sebaliknya jarak yang cukup jauh antara Kecamatan pusat pertumbuhan Kalisat dengan daerah belakang Kecamatan Tempurejo akan memiliki nilai indeks aksesibilitas terendah. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa dalam menganalisis indeks aksesibilitas, variabel jarak sangat mempengaruhi kuat lemahnya interaksi atau besar kecilnya daya tarik antar wilayah.

Ketidakseimbangan dalam pola pertumbuhan pada setiap daerah karena keunggulan komparatif yang terjadi pada masing-masing daerah berbeda, sehingga tidak semua daerah mempunyai pola pertumbuhan yang tinggi semua, demikian pula yang terjadi pada daerah yang mempunyai pola pertumbuhan rendah. Sesuai dengan pendapat Richardson (1991:36) bahwa keunggulan komparatif sektor-sektor

perekonomian yang dimiliki suatu daerah akan menyebabkan suatu daerah akan tumbuh lebih cepat. Pendapat Glasson (1990:94) mengenai terjadinya perbedaan pola pertumbuhan disebabkan pola struktur yang berbeda antar daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Dalam perhitungan analisis indeks Williamson memperlihatkan bahwa antar pusat pertumbuhan dengan daerah terbelakang di Kabupaten Jember rata-rata terjadi kesenjangan pendapatan yang besar. Kesenjangan pendapatan tertinggi di SSWP Jember bagian Utara Timur dengan pusat pertumbuhan di Kecamatan Kalisat. Besarnya tingkat kesenjangan di SSWP Jember bagian Utara yang berpusat di Kalisat disebabkan oleh pusat pertumbuhan daerah tersebut membawahi daerah belakang yang jauh dari pusat pertumbuhan (Kalisat – Tempurejo), sehingga efek penyebarannya dari pusat pertumbuhan dalam proses pertumbuhan tidak sepenuhnya sampai ke daerah belakangnya. Kecenderungan ketimpangan pendapatan juga dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya baik alam maupun manusia seperti daerah belakang Kecamatan Tempurejo mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dibanding dengan pusat pertumbuhan Kecamatan Kalisat meskipun jarak Kecamatan Tempurejo dengan Kecamatan Kalisat cukup jauh.

Hasil analisis indeks Williamson membuktikan kebenaran dari teori Perroux, Hirschman dan Myrdall masing-masing pada dasarnya berpendapat bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada saat yang bersamaan, pertumbuhan akan terjadi pada beberapa tempat atau pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda dan berkembang melalui saluran yang berbeda (Nuryasman, 1996:241). Oleh sebab itu dalam proses pembangunan di Kabupaten Jember pertumbuhan pendapatan sudah semakin tinggi tetapi belum diimbangi dengan pemerataan pendapatan, sehingga masih terjadi adanya kesenjangan. Kesenjangan akan semakin besar apabila pemerintah Kabupaten Jember tidak menerapkan kebijaksanaan pusat pertumbuhan dalam strategi pembangunan daerahnya, hanya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan.

Kabupaten Jember secara umum berhasil menerapkan kebijaksanaan pembangunannya sesuai dengan teori pusat pertumbuhan dalam bentuk kebijaksanaan SSWP, ditegaskan dalam hasil analisis yang telah diuraikan dalam sub bab hasil analisis. Pusat pertumbuhan akan memberikan peranan yang lebih besar dalam pengembangan pembangunan daerah belakangnya meskipun intensitas penyebarannya yang diterima oleh daerah belakang berbeda-beda. *Spread effects* dari pusat-pusat SSWP sebagai pusat pertumbuhan bagi daerah belakangnya hanya menjangkau sampai pada batas tertentu, ada sebagian daerah belakang yang tidak dapat menikmati *spread effects* dari pusat pertumbuhan disebabkan oleh jarak yang jauh dan justru menerima *spread effects* dari hasil daerah belakang lainnya yang lebih dekat. Misalnya Kecamatan Tempurejo sebagai daerah belakang mempunyai jarak yang jauh (50 km) dari pusat pertumbuhan, Kecamatan Kalisat dan Kecamatan Jenggawah mempunyai jarak 32 km dari pusat pertumbuhannya yaitu Kecamatan Tanggul, sehingga *spread effect* tidak dapat diterima oleh daerah belakang tersebut. Ada kecenderungan terjadi aglomerasi pada pusat SSWP karena tingginya nilai indeks gravitasi dan indeks aksesibilitas dengan sarana-sarana yang lebih lengkap. Jelas sekali bahwa dalam kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Jember, teori pusat pertumbuhan dan teori tempat sentral diterapkan walaupun dalam pelaksanaannya banyak kendala yang dihadapi, antara lain penyebaran penduduk yang tidak merata, pertumbuhan yang tidak merata di masing-masing daerah, besarnya kesenjangan pendapatan antara daerah yang disebabkan ketidakseimbangan sumber daya terutama sumber daya manusia, perbedaan letak geografis masing-masing daerah, serta jarak antar wilayah yang cukup jauh.



## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. keberadaan pusat Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) atau pusat pertumbuhan dalam kebijaksanaan perwilayahan di Kabupaten Jember mampu memberikan peranan yang cukup besar terhadap pengembangan wilayah-wilayah belakangnya. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya nilai indeks gravitasi dari nilai indeks aksesibilitas dari daerah belakang ke pusat pertumbuhan. Angka indeks gravitasi dengan rata-rata 40.090.798,81 dengan nilai tertinggi sebesar 158.234.912 dan nilai terendah sebesar 1.890.934,475. Angka indeks aksesibilitas rata-rata 258,133 dengan nilai tertinggi sebesar 1164,8 dan nilai terendah sebesar 11,648. Nilai indeks gravitasi dan nilai indeks aksesibilitas semakin besar jika jarak daerah belakang ke pusat pertumbuhan dekat dan sebaliknya. Semakin besarnya nilai indeks gravitasi dan nilai indeks aksesibilitas dari daerah belakang ke pusat pertumbuhan menunjukkan bahwa sarana-sarana yang tersedia di pusat pertumbuhan digunakan oleh daerah belakangnya dan semakin besar pula fungsi pusat pertumbuhan sebagai pusat pelayanan bagi daerah sekitarnya;
2. pusat pertumbuhan mempunyai peranan pengembangan wilayah di Kabupaten Jember. Dari pusat pertumbuhan membentuk kesatuan pengembangan di wilayah Kabupaten Jember dimana peranan pusat pertumbuhan dalam pengembangan wilayah ditunjukkan oleh nilai indeks Williamson yang rata-ratanya sebesar 0,793 dengan nilai tertinggi sebesar 0,874 dan nilai terendah sebesar 0,724. Dua Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) mempunyai nilai indeks Williamson besar sebab utamanya jauh jarak antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya. Sehingga efek penyebaran dalam proses pembangunan tidak sampai sepenuhnya

pada daerah belakang yang jauh. Dengan kata lain *spread effect* tidak menjangkau pada batas-batas tertentu.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. peranan pusat pertumbuhan terhadap pengembangan wilayah belakang yang ditunjukkan dengan adanya *spread effect* dalam kenyataannya fungsinya dibatasi oleh jarak antara dua daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Jember perlu membentuk pusat pertumbuhan pendamping yang mempunyai fungsi sebagai pendorong pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya serta menjembatani antara dua kawasan yang berjauhan. Utamanya bagi pusat pertumbuhan yang membawahi banyak kecamatan. Membentuk pusat pertumbuhan pendamping yang dimaksud adalah membentuk pusat pertumbuhan alternatif di daerah yang mempunyai fasilitas lebih yang berada diantara pusat pertumbuhan dan daerah belakang yang jaraknya berjauhan, agar daerah belakang yang tidak menerima *spread effect* dari pusat pertumbuhan dapat menerima *spread effect* dari pusat pertumbuhan pendamping;
2. perlu penelitian lebih lanjut mengenai potensi-potensi yang ada pada masing-masing kecamatan untuk menentukan keunggulan komparatif wilayah agar dapat dikembangkan menuju keunggulan kompetitif wilayah agar mempersempit kesenjangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, I.J. 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta : LPFE-UI.
- Bappeda Kabupaten Jember. 1993. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember tahun 2003/2004*. Jember : Pemerintah Kabupaten Jember
- Bintarto, R. dan H. Surastopo. 1982. *Metode Analisa Geografi*. Jakarta : LP3ES.
- BPS Kabupaten Jember. 2000. *Jember dalam Angka*. Jember : BPS.
- Budiharsono, S. 1989. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : FE-UI.
- Gaspers, V. 1990. *Analisa Kuantitatif untuk Perencanaan*. Bandung : Tarsito.
- Glasson, John. 1991. *Pengantar Perencanaan Regional*. Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta : LPFE-UI.
- Hadjaroso, P. 1982. *Konsepsi Dasar Pengembangan Wilayah di Indonesia*. Departemen Pekerjaan Umum.
- Ishanders. 1984. *Regional Tinjauan Sepintas Lalu Tentang Aspek-aspek Pokoknya (Pengantar Analisa Regional)*. Jakarta : Institut Ilmu Pemerintahan.
- Nuryasman. 1996. *Pengembangan Konsep Pusat Pertumbuhan Terhadap Wilayah Kepulauan Indonesia*. Media Ekonomi Vol. 3 No.3. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Pratiwi, E.A. 1998. *Peranan Pusat-pusat Pertumbuhan terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Dati II Malang*. Skripsi tidak dipublikasikan. Jember : FE-UNEJ.
- Richardson, H.W. 1991. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta : LPFE-UI.
- Soewarjoko, W. 1984. *Analisis Kota dan Daerah*. Bandung : ITB.
- Sugiarto. 1997. *Peranan Pusat-pusat Pertumbuhan terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Dati II Banyuwangi*. Skripsi tidak dipublikasikan. Jember : FE-UNEJ.
- Sukirno, S. 1979. *Beberapa Aspek dalam Pembangunan*. Jakarta : LPFE-UI.
- Sumadmadja, N. 1988. *Studi Geografi Pendekatan Analisa Keuangan*. Bandung : Alumni Bandung.

Lampiran 1. Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2000

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah (Jiwa)	Sex Ratio
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)		
1.	Kencong	32,405	33,444	65,849	0.969
2.	Jombang	24,835	25,828	50,663	0.962
3.	Gemukmas	38,448	38,965	77,413	0.987
4.	Puger	52,425	53,011	105,436	0.989
5.	Wuluhan	52,686	53,085	105,771	0.992
6.	Ambulu	50,396	49,924	100,320	1.009
7.	Tempurejo	34,380	36,568	70,948	0.940
8.	Silo	45,233	46,389	91,622	0.975
9.	Mayang	21,416	22,566	43,982	0.949
10.	Mumbulsari	27,697	29,237	56,934	0.947
11.	Jenggawah	37,530	39,428	76,958	0.952
12.	Ajung	32,025	33,020	65,045	0.970
13.	Sukorambi	17,079	18,018	35,097	0.948
14.	Rambipuji	33,218	35,707	68,925	0.930
15.	Balung	36,323	37,005	73,328	0.982
16.	Umbulsari	34,985	35,156	70,141	0.995
17.	Sumberbaru	47,727	49,786	97,513	0.959
18.	Tanggul	37,541	38,763	76,304	0.968
19.	Semboro	22,418	22,553	44,971	0.994
20.	Bangsalsari	51,666	53,794	105,460	0.960
21.	Panti	27,826	28,848	56,674	0.965
22.	Arjasa	16,913	18,470	35,383	0.916
23.	Jelbuk	14,875	14,824	29,699	1.003
24.	Pakusari	18,414	19,110	37,524	0.964
25.	Kalisat	31,740	34,891	66,631	0.910
26.	Sukowono	26,817	27,961	54,778	0.959
27.	Ledokombo	28,173	29,241	57,414	0.963
28.	Sumberjambe	27,016	28,106	55,122	0.961
29.	Sumpersari	51,338	52,769	104,107	0.973
30.	Kaliwates	44,573	48,928	93,501	0.911
31.	Patrang	44,195	44,985	89,180	0.982
<b>J U M L A H</b>		<b>1,062,313</b>	<b>1,100,380</b>	<b>2,162,693</b>	<b>29.885</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, April 2002

Lampiran 2. Jumlah Tenaga Kerja, Angkatan Kerja Bekerja dan Penganggur Menurut Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2000 (dalam jiwa)

No	Kecamatan	Tenaga Kerja	Angkatan Kerja Bekerja	Penganggur
1.	Kencong	46,074	28,785	1,306
2.	Jombang	42,156	26,337	1,195
3.	Gemukmas	54,134	33,821	1,534
4.	Puger	73,682	46,033	2,088
5.	Wuluhan	73,718	46,056	2,090
6.	Ambulu	70,081	43,783	1,986
7.	Tempurejo	49,725	31,066	1,409
8.	Silo	63,881	39,910	1,811
9.	Mayang	30,711	19,187	870
10.	Mumbulsari	39,406	24,619	1,117
11.	Jenggawah	53,819	33,624	1,525
12.	Ajung	45,257	28,275	1,283
13.	Sukorambi	24,622	15,383	698
14.	Rambipuji	48,390	30,232	1,372
15.	Balung	51,279	32,037	1,453
16.	Umbulsari	49,245	30,766	1,396
17.	Sumberbaru	68,289	42,664	1,936
18.	Tanggul	53,480	33,412	1,516
19.	Semoro	31,571	19,724	895
20.	Bangsalsari	73,325	45,810	2,078
21.	Panti	38,067	23,783	1,079
22.	Arjasa	24,900	15,556	706
23.	Jelbuk	20,757	12,968	588
24.	Pakusari	25,824	16,134	732
25.	Kalisat	46,611	29,120	1,321
26.	Sukowono	38,329	23,946	1,086
27.	Ledokombo	40,133	25,073	1,138
28.	Sumberjambe	38,253	23,899	1,084
29.	Sumbersari	72,656	45,392	2,059
30.	Kaliwates	65,397	40,857	1,854
31.	Patrang	61,866	38,651	1,754
<b>J U M L A H</b>		<b>1,515,638</b>	<b>946,903</b>	<b>42,959</b>

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, April 2002

Lampiran 3. Jarak Terdekat Antar Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2000 (dalam kilometer)

Kecamatan	Kencong	Jombang	Gumukmas	Puger	Wuluhan	Ambulu	Tempurejo	Silo	Mayang	Mumbulsari	Jenggawah	Ajung	Sukorambi	Rambipuji	Balung	Umbulsari	Sumberbaru	Tanggul	Semboro	Bangsalsari	Panti	Arjasa	Jelbuk	Pakusari	Kalisat	Sukowono	Ledokombo	Sumberjambe	Sumbersari	Kaliwates	Patrang
Kencong	0	5	7	21	32	40	52	68	60	59	47	45	44	33	26	15	25	15	10	25	32	52	56	54	60	70	74	80	50	40	50
Jombang	5	0	12	26	37	45	57	73	65	64	52	50	49	38	31	20	30	20	15	30	37	57	61	54	65	75	79	85	53	45	55
Gumukmas	7	12	0	15	25	33	47	73	65	54	42	50	49	38	21	10	30	20	15	30	27	47	61	49	55	65	69	75	43	35	45
Puger	21	26	15	0	11	17	36	66	61	49	28	35	39	28	16	25	43	33	28	36	28	49	53	51	57	67	71	77	47	37	42
Wuluhan	32	37	25	11	0	6	25	55	5	37	17	23	26	19	7	19	43	33	28	27	31	32	36	36	42	52	56	62	31	26	32
Ambulu	40	45	33	17	6	0	19	49	44	32	11	29	24	25	13	25	41	31	26	21	29	32	36	34	40	50	54	60	31	21	30
Tempurejo	52	57	47	36	25	19	0	50	45	9	8	12	22	25	34	46	70	60	70	50	44	35	39	39	50	60	64	70	28	18	45
Silo	68	73	73	66	55	49	50	0	5	17	37	34	34	37	49	60	65	55	60	45	39	25	29	16	10	20	19	25	22	30	30
Mayang	60	65	65	61	5	44	45	5	0	12	27	22	24	27	39	56	55	45	50	35	29	18	19	6	5	15	14	20	12	20	20
Mumbulsari	59	64	54	49	37	32	9	17	12	0	21	14	22	25	33	45	49	39	44	47	23	30	34	28	17	27	26	32	14	14	20
Jenggawah	47	52	42	28	17	11	8	37	27	21	0	7	15	14	12	43	42	32	37	22	16	19	23	21	27	37	41	47	20	10	17
Ajung	45	50	50	35	23	29	12	34	22	14	7	0	8	11	23	40	39	29	34	19	13	16	20	18	24	34	38	44	13	3	14
Sukorambi	44	49	49	39	26	24	22	34	24	22	15	8	0	11	23	40	39	29	34	19	3	16	20	18	24	34	38	44	12	4	14
Rambipuji	33	38	38	28	19	25	25	37	27	25	14	11	11	0	12	31	28	18	23	8	4	19	23	21	27	37	41	47	15	7	17
Balung	26	31	21	16	7	13	34	49	39	33	12	23	23	12	0	12	40	30	35	20	16	31	35	33	39	49	53	57	27	19	29
Umbulsari	15	20	10	25	19	25	46	60	56	45	43	40	40	31	12	0	23	14	8	23	33	48	52	50	56	66	70	76	44	39	46
Sumberbaru	25	30	30	43	43	41	70	65	55	49	42	39	39	28	40	23	0	10	15	20	32	47	51	49	55	65	69	75	43	35	45
Tanggul	15	20	20	33	33	31	60	55	45	39	32	29	29	18	30	14	10	0	6	10	22	37	41	39	45	55	59	65	33	25	35
Semboro	10	15	15	28	28	26	70	60	50	44	37	34	34	23	35	8	15	6	0	15	27	42	46	44	50	60	64	70	38	30	40
Bangsalsari	25	30	30	36	27	21	50	45	35	47	22	19	19	8	20	23	20	10	15	0	13	28	32	29	35	45	49	55	23	15	26
Panti	32	37	27	28	31	29	44	39	29	23	16	13	3	4	16	33	32	22	27	13	0	21	25	23	29	39	43	49	17	9	12
Arjasa	52	57	47	49	32	32	35	25	18	30	19	16	16	19	31	48	47	37	42	28	21	0	4	12	8	20	24	30	7	12	2
Jelbuk	56	61	61	53	36	36	39	29	19	34	23	20	20	23	35	52	51	41	46	32	25	4	0	16	12	24	28	39	9	16	6
Pakusari	54	54	49	51	36	34	39	16	6	28	21	18	18	21	33	50	49	39	44	29	23	12	16	0	10	20	20	26	6	14	14
Kalisat	60	65	55	57	42	40	50	10	5	17	27	24	24	27	39	56	55	45	50	35	29	8	12	10	0	10	20	25	18	20	10
Sukowono	70	75	65	67	52	50	60	20	15	27	37	34	34	37	49	66	65	55	60	45	39	20	24	20	10	0	30	20	28	30	20
Ledokombo	74	79	69	71	56	54	64	19	14	26	41	38	38	41	53	70	69	59	64	49	43	24	28	20	20	30	0	6	32	34	24
Sumberjambe	80	85	75	77	62	60	70	25	20	32	47	44	44	47	57	76	75	65	70	55	49	30	39	26	25	20	6	0	38	40	30
Sumbersari	50	53	43	47	31	31	28	22	12	14	20	13	12	15	27	44	43	33	38	23	17	7	9	6	18	28	32	38	0	0	10
Kaliwates	40	45	35	37	26	21	18	30	20	14	10	3	4	7	19	39	35	25	30	15	9	12	16	14	20	30	34	40	10	0	10
Patrang	50	55	45	42	32	30	45	30	20	20	17	14	14	17	29	46	45	35	40	26	12	2	6	14	10	20	24	30	6	10	0

Sumber : BPS Kabupaten Jember, April 2002

Lampiran 4. Pendapatan Perkapita Menurut Kecamatan di Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1998-2000 (dalam rupiah)

No	Kecamatan	1998	1999	2000
1.	Kencong	768,936	781,940	806,817
2.	Jombang	788,400	679,019	833,629
3.	Gumukmas	742,146	759,376	783,250
4.	Puger	910,951	734,350	962,156
5.	Wuluhan	715,497	728,670	750,004
6.	Ambulu	1,010,883	1,030,370	4,060,430
7.	Tempurejo	706,680	721,834	746,515
8.	Silo	697,578	712,051	733,847
9.	Mayang	1,482,069	1,515,693	1,561,904
10.	Mumbulsari	803,312	819,121	840,230
11.	Jenggawah	809,366	749,378	772,697
12.	Ajung	693,619	706,031	727,373
13.	Sukorambi	803,929	816,134	843,139
14.	Rambipuji	708,182	721,234	746,854
15.	Balung	1,051,562	1,064,003	1,097,301
16.	Umbulsari	647,566	666,791	691,717
17.	Sumberbaru	672,159	687,938	712,185
18.	Tanggul	798,696	815,484	843,726
19.	Semboro	1,034,898	1,056,027	1,091,416
20.	Bangsalsari	526,329	537,590	553,676
21.	Panti	918,289	923,400	929,378
22.	Arjasa	597,517	608,948	634,039
23.	Jelbuk	651,183	663,009	684,897
24.	Pakusari	1,134,531	1,148,829	1,652,445
25.	Kalisat	692,435	687,070	709,762
26.	Sukowono	564,980	579,653	600,902
27.	Ledokombo	827,040	836,272	863,281
28.	Sumberjambe	561,106	571,714	589,302
29.	Sumbersari	1,529,496	1,538,334	1,579,261
30.	Kaliwates	2,498,029	2,499,984	2,561,684
31.	Patrang	1,760,729	1,764,753	1,785,437

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, April 2002

Lampiran 5. Perhitungan Analisa Indeks Gravitasi di Kabupaten Jember Tahun 2000

Sub Satuan Wilayah Pembangunan	$P_1$	$P_2$	$(J_{12})^b$	$I_{12}$
<b>1. Jember Bagian Utara Timur</b>				
Berpusat di Kalisat	66,631			
Ledokombo		57,414	400	9,563,880.585
Sumberjambe		55,122	625	5,876,534.371
Arjasa		35,383	64	36,837,573.016
Jelbuk		29,699	144	13,742,181.035
Pakusari		37,524	100	25,002,616.440
Sukowono		54,779	100	36,499,795.490
Mayang		43,983	25	117,225,250.920
Silo		91,622	100	61,048,654.820
Mumbulsari		56,934	289	13,126,537.557
Tempurejo		70,948	2,500	1,890,934.475
<b>2. Jember Bagian Tengah/Administratif</b>				
Berpusat di Kaliwates	93,502			
Sumbersari		104,107	100	97,342,127.140
Patrang		89,180	100	83,385,083.600
<b>3. Jember Bagian Barat Utara</b>				
Berpusat di Tanggul	76,304			
Semoro		44,971	36	95,318,532.889
Sumberbaru		97,513	100	74,406,319.520
Bangsalsari		105,460	100	80,470,198.400
Rambipuji		68,925	324	16,332,262.060
Jenggawah		76,958	1,024	5,734,573.469
Panti		56,674	484	8,934,820.033
Sukorambi		35,097	841	3,184,353.731
Ajung		65,043	841	5,901,356.804
<b>4. Jember Bagian Barat Selatan</b>				
Berpusat di Balung	73,304			
Wuluhan		105,772	49	158,234,912.000
Ambulu		100,320	169	43,513,948.402
Kencong		65,848	676	7,140,416.852
Gemukmas		50,663	441	8,421,316.444
Umbulsari		70,140	144	35,705,156.667
Puger		105,435	256	30,190,653.281
Jombang		97,412	961	7,430,477.886

Sumber : Data Sekunder Diolah, Mei | 2002

Lampiran 6. Perhitungan Analisa Indeks Aksesibilitas di Kabupaten Jember Tahun 2000

Sub Satuan Wilayah Pembangunan	Ej	(dij) <sup>b</sup>	Aij
<b>1. Jember Bagian Utara Timur</b>			
Berpusat di Kalisat	29,120		
Ledokombo		400	78.800
Sumberjambe		625	46,592.000
Arjasa		64	455.000
Jelbuk		144	202.222
Pakusari		100	291.200
Sukowono		100	291.200
Mayang		25	1,164.800
Silo		100	291.200
Mumbulsari		289	100.761
Tempurejo		2,500	11.648
<b>2. Jember Bagian Tengah/Administratif</b>			
Berpusat di Kaliwates	40,857		
Sumbersari		100	408.570
Patrang		100	408.570
<b>3. Jember Bagian Barat Utara</b>			
Berpusat di Tanggul	33,412		
Semoro		36	928.111
Sumberbaru		100	334.120
Bangsalsari		100	334.120
Rambipuji		324	103.123
Jenggawah		1,024	32.629
Panti		484	69.033
Sukorambi		841	39.729
Ajung		841	39.729
<b>4. Jember Bagian Barat Selatan</b>			
Berpusat di Balung	32,037		
Wuluhan		49	653.816
Ambulu		169	189.568
Kencong		676	47.392
Gumukmas		441	72.646
Umbulsari		144	222.479
Puger		256	125.145
Jombang		961	33.337

Sumber : Data Sekunder Diolah, Mei 2002

Sub Satuan Wilayah Pembangunan	(Pendapatan Nasional)	Jumlah Penduduk	$(Y_i - \bar{Y})^2$	$f_i/h$	$(Y_i - \bar{Y})^2 f_i/h$	$\Sigma (Y_i - \bar{Y})^2 f_i/h$	$\frac{\Sigma (Y_i - \bar{Y})^2 f_i/h}{Y}$	$\frac{\Sigma (Y_i - \bar{Y})^2 f_i/h}{\bar{Y}}$	
<b>1. Jember Bagian Utara Timur</b>									
Berpusat di Kalisat	709,762	66,631							
Ledokombo	863,281	57,414	23,568,083,361	0.862	20,307,933,815.918	543329778.500	765509.817	0.874	
Sumberjambe	589,302	55,122	14,510,611,600	0.827	12,004,231,252.948				
Ajasa	634,039	35,383	5,733,972,729	0.331	3,044,906,380.967				
Jelbuk	684,897	29,699	618,268,225	0.446	273,576,653.724				
Pakusari	652,443	37,524	3,285,467,761	0.563	1,850,248,266.779				
Sukowono	600,902	54,779	3,285,238,489	0.822	1,846,304,031,000.000				
Mayang	1,561,904	43,983	726,145,988,164	0.660	479,327,625,240.762				
Silo	733,847	91,622	580,087,225	1.375	797,658,022.977				
Mumbulsari	840,230	56,934	17,021,899,024	0.854	14,544,653,375.042				
Tempurejo	746,515	70,948	1,350,783,009	1.065	1,438,299,784.223				
<b>2. Jember Bagian Tengah/Administratif</b>									
Berpusat di Kaliwates	2,561,684	93,502							
Sumbersari	1,579,261	104,107	965,154,950,929	1.113	1,074,622,858,081.810	1649329792037.260	643845.920	0.802	
Patrang	1,785,437	89,180	602,559,405,009	0.954	574,706,933,955.451				
<b>3. Jember Bagian Barat Utara</b>									
Berpusat di Tanggul	843,726	76,304							
Semboro	1,091,416	44,971	61,350,336,100	0.589	36,157,815,642.078	403291595737.993	598469.757	0.773	
Sumberbaru	712,185	971,513	17,303,034,681	12.732	220,304,612,235.824				
Bangsalsari	553,676	105,460	84,129,002,500	1.382	116,274,960,731.416				
Rambipuji	746,854	68,925	9,384,184,384	0.903	8,476,684,166.848				
Jenggawah	772,697	76,958	5,045,118,841	1.009	5,088,360,449.854				
Panti	929,378	56,674	7,336,265,104	0.743	5,448,934,374.398				
Sukorambi	843,139	35,097	344,569	0.460	158,488.915				
Ajung	727,373	65,043	13,538,020,609	0.852	11,540,069,648.658				
<b>4. Jember Bagian Barat Selatan</b>									
Berpusat di Balung	1,097,301	73,328							
Wuluhan	750,004	105,772	120,615,206,209	1.442	173,981,447,620.804	576153139482.287	525063.897	0.724	
Ambulu	1,060,430	100,320	1,359,470,641	1.368	1,859,891,101.695				
Kencong	806,817	65,320	84,380,954,256	0.891	75,165,883,864.307				
Gumukmas	783,250	50,663	98,628,030,601	0.691	68,143,027,415.700				
Umbulsari	691,717	70,140	164,498,381,056	0.957	157,346,667,674.938				
Puger	962,156	105,435	18,264,171,025	1.438	26,261,221,798.234				
Jombang	833,629	77,412	69,522,923,584	1.056	73,395,000,006.609				

Sumber : Data Sekunder Diolah, Mei 2002

RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN DATI II JEMBER  
TAHUN 1993/1994 - 2003/2004

lamdar 2.3

PERWILAYAHAN  
PENGEMBANGAN  
KABUPATEN JEMBER

KETERANGAN

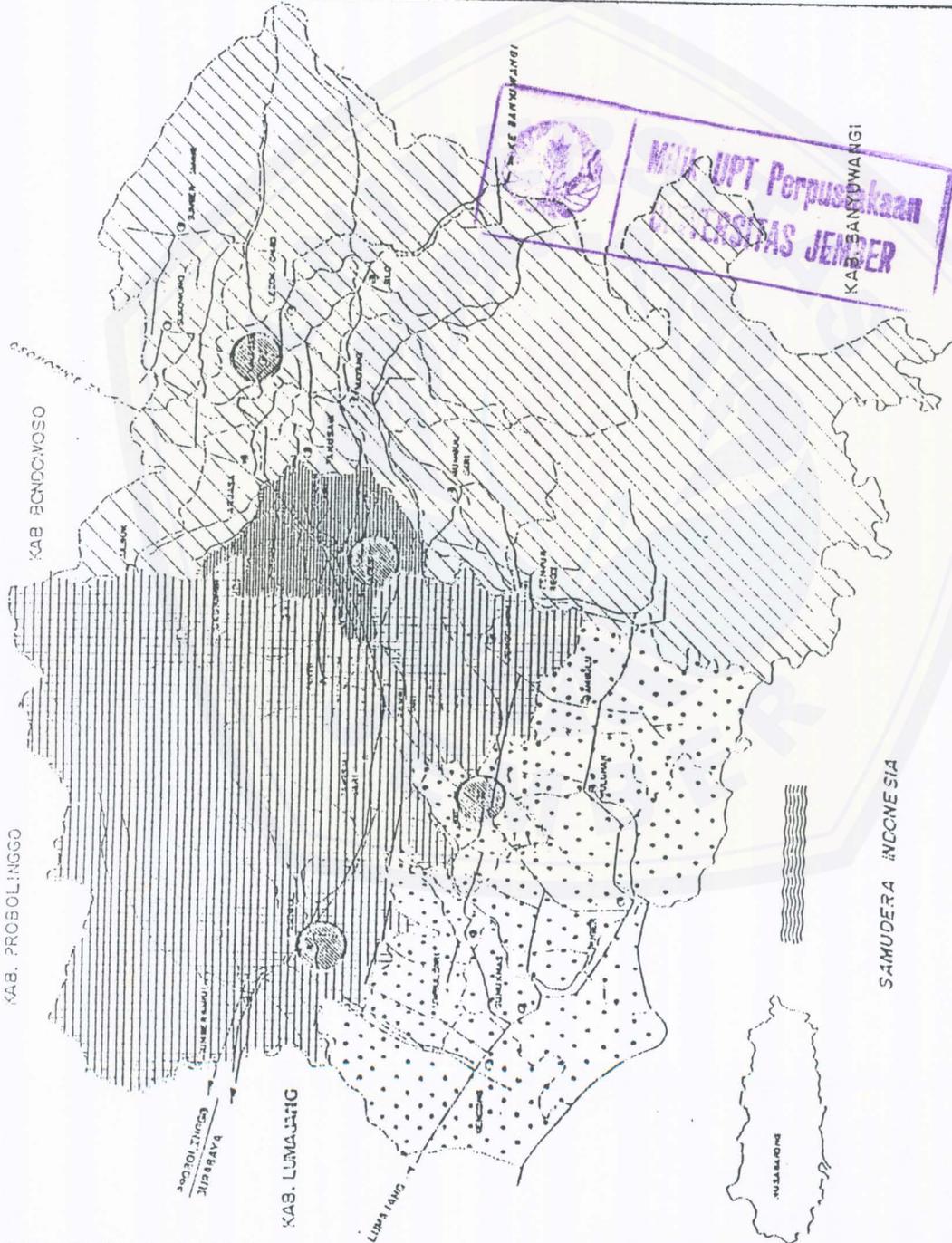
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- KANTOR KABUPATEN
- KANTOR KECAMATAN
- REL KERETA API
- JALAN ASPAL
- SUNGAI
- PUSAT SUB SWP
- SUB SWP BAGIAN UTARA-TIMUR
- SUB SWP BAGIAN TENGAH
- SUB SWP BAGIAN BARAT-UTARA
- SUB SWP BAGIAN BARAT-SELATAN

SUMBER DATA:  
BAPPEDA II Kab. Jember



SKALA 1 : 300.000

PEMERINTAHAN KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II  
JEMBER



KABUPATEN JEMBER

RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN DATI II JEMBER  
TAHUN 1993/1994 - 2002/2004

Gambar 2.4

SATUAN KAWASAN  
PEMBANGUNAN

KETERANGAN

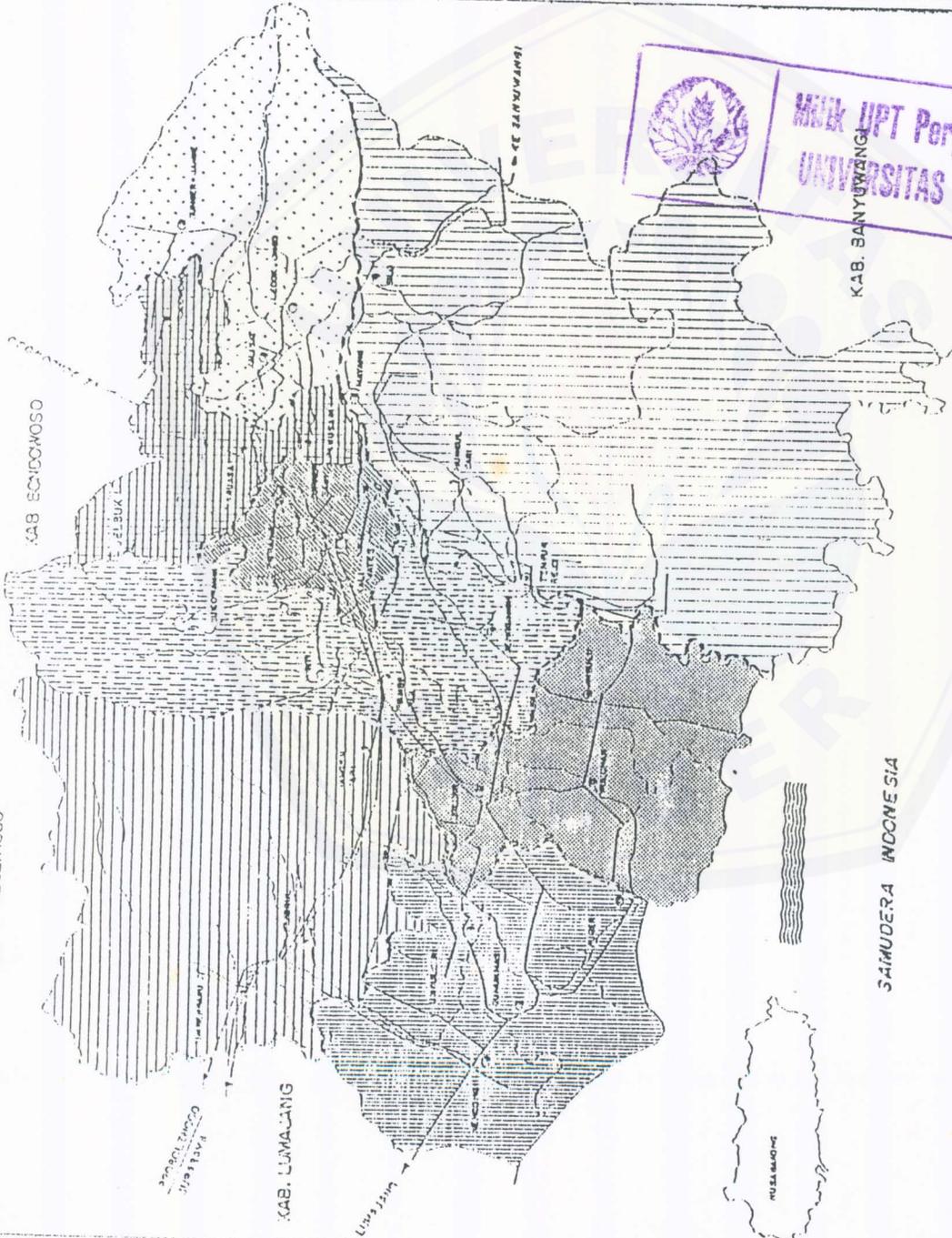
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- KANTOR KABUPATEN
- KANTOR KECAMATAN
- REL KERETA API
- JALAN ASPAL
- SUNGAI
- BATAS SKP
- SKP 13.4.1
- SKP 13.4.2
- SKP 13.4.3
- SKP 13.4.4
- SKP 13.4.5
- SKP 13.4.6
- SKP 13.4.7
- SKP 13.4.8

SUMBER DATA:  
BAPPEDA II Kab. Jember



SKALA 1 : 300.000

PEMERINTAHAN KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II  
JEMBER



KABUPATEN JEMBER